

**ANALISIS ISI PENERAPAN DIKSI DALAM BAHASA
JURNALISTIK PADA *HEADLINE* SURAT KABAR RIAU POS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



Oleh

NAMA : RIYAN NOFITRA

NIM: 10643004257

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan ide dan sumber pendukung untuk melengkapi skripsi ini. Walaupun demikian, penulis benar-benar merasakan bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis selama ini baik berupa motivasi, bantuan moril, materil dan sebagainya dalam merampungkan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. HM. Nazir Karim, MA selaku Rektor UIN Suska beserta bapak-bapak pembantu rektor.
2. Bapak Prof. DR. Amril M. MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta bapak/ibu pembantu dekan.
3. Bapak DR. Nurdin A. Halim selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi.
4. Ibu Dosen Titi Antin MA dan Bapak Firdaus Elhadi M. Soc. Sc selaku pembimbing skripsi penulis, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberi masukan kepada penulis dan juga mendukung penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.

5. Bapak/Ibu Dosen, Staf maupun Karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.
6. Orang tuaku tercinta Ayahanda Novizar yang terus mendoakan penulis dan memotivasi penulis agar semangat kuliah dengan rajin. Buat Almh Ibunda Nurhayati semoga tenang dialam sana.
7. Abangnda tercinta Anton Afriyatno dan Adinda Jery Novandri, Tiara Novia Landa dan Suci Rahmadayanti yang terus memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis.
8. Umi Linawati dan Ayah Kaharuddin yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi ini.
9. Adinda Tercinta Nursyamsiati yang selalu mendoakan penulis agar mudah dalam segala urusan, dan selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam merampungkan skripsi ini.
10. Adinda Pandu dan Sapno yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman seperjuangan, Arie, Metha, Triono, Agus, Eka dan banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan dan suportnya selama ini.
12. Rumah ke-duaku, Tabloid Mahasiswa UIN Suska *Gagasan* yang telah menempa penulis dalam berorganisasi terutama mengetahui ilmu jurnalistik.

13. Rekan-rekan di Tabloid *Gagasan* 2010, Arie, Melba, Riki, Sandi, Amin, Tema, Yanti, Lena, Susi, Lela, Hera, Fhatiyah. Serta Gilang, Alek, Wilna, Didi, Nia, Vina, Inar, Tari dan adek-adek kru baru yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
14. Redaktur Surat Kabar Riau Pos, Harry B Koriun yang telah membantu penulis dalam merampungkan skripsi ini.
15. Temanku Tados Marta yang tak bosan-bosannya menyuruh penulis untuk cepat merampungkan skripsi.
16. Dan semua pihak yang telah banyak membantu, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang setimpal.

Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, 16 Januari 2012

Riyan Nofitra

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	8
D. Batasan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Penegasan Istilah	9
G. Kerangka Teoritis	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Diksi	11
2. Bahasa Jurnalistik	15
3. <i>Headline</i>	19
4. <i>Readability Theory</i>	19
B. Konsep Operasional	22
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II Gambaran Umum Surat Kabar Riau Pos	28
A. Sejarah Singkat Surat Kabar Riau Pos	28
B. Sistem Kerja Surat Kabar Riau Pos	31
C. Sarana dan Prasarana	33

D. Struktur Organisasi	34
BAB III Penyajian Data	42
Berita Pada <i>Headline</i> Surat Kabar Riau Pos	42
a. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 1 Juni 2011.....	43
b. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 2 Juni 2011	49
c. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 3 Juni 2011	54
d. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 4 Juni 2011	60
e. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 5 Juni 2011	67
f. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 6 Juni 2011	71
g. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 22 Juni 2011	74
h. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 24 Juni 2011	77
i. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 25 Juni 2011	79
BAB IV Analisi Data	84
A. Penerapan Diksi Dalam Bahasa Jurnalistik	85
B. Analisis Penerapan Diksi Dalam Bahasa Jurnalistik Pada Berita	
<i>Headline</i> Surat Kabar Riau Pos	89
a. Analisa <i>Headline</i> Edisi 1 Juni 2011.....	90
b. Analisa <i>Headline</i> Edisi 2 Juni 2011.....	100
c. Analisa <i>Headline</i> Edisi 3 Juni 2011	104
d. Analisa <i>Headline</i> Edisi 4 Juni 2011.....	110
e. Analisa <i>Headline</i> Edisi 5 Juni 2011.....	115
f. Analisa <i>Headline</i> Edisi 6 Juni 2011	119
g. Analisa <i>Headline</i> Edisi 22 Juni 2011.....	121
h. Analisa <i>Headline</i> Edisi 23 Juni 2011.....	123
i. Analisa <i>Headline</i> Edisi 24 Juni 2011.....	123
BAB V Penutup	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	130

ABSTRAKSI

Dalam menyampaikan informasi, seorang jurnalis dituntut agar pesan yang disampaikan mencapai efek optimal, menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas jelas dan lugas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Terlebih penting, seorang jurnalis harus mampu memilih kata (Diksi) dalam bahasa jurnalistik agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca tanpa berfikir terlebih dulu. Pilihan kata atau diksi dalam bahasa jurnalistik tidak sekedar sebagai varian dalam gaya, tetapi juga suatu keputusan yang didasarkan pertimbangan matang untuk mencapai efek optimal terhadap khalayak.

Kesalahan dalam memilih kata dapat berakibat fatal, tanpa pertimbangan matang, kata yang dipakai bisa berdampak pada profokatif, kerancuan (kacau) dan sulit dipahami. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa dan ungkapan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana penerapan diksi dalam bahasa jurnalistik pada berita *headline* Surat kabar Riau Pos. Tampilnya Surat kabar Riau Pos sebagai media terbesar di Riau, menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti media cetak tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui lebih jelas dan menganalisa penerapan diksi dalam bahasa jurnalistik di Surat kabar Riau Pos.

Sedangkan data yang berjumlah sembilan sampel dari berita *headline* dengan tema hukum dan politik penulis uji dengan beberapa indikator penerapan diksi yaitu: Kata Bersinonim, Kata Bernilai Rasa, Kata Umum, Kata Abstrak, dan kata lugas. selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat. Penarikan kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa masih terdapat ketidaktepatan dalam memilih kata atau diksi dalam bahasa jurnalistik pada berita *headline* Surat kabar Riau Pos melalui proses analisis berdasarkan indikator penerapan diksi dalam bahasa jurnalistik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	8
D. Batasan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Penegasan Istilah	9
G. Kerangka Teoritis	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Diksi	11
2. Bahasa Jurnalistik	15
3. <i>Headline</i>	19
4. <i>Readability Theory</i>	19
B. Konsep Operasional	22
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II Gambaran Umum Surat Kabar Riau Pos	28
A. Sejarah Singkat Surat Kabar Riau Pos	28
B. Sistem Kerja Surat Kabar Riau Pos	31
C. Sarana dan Prasarana	33
D. Struktur Organisasi	34

BAB III Penyajian Data	42
Berita Pada <i>Headline</i> Surat Kabar Riau Pos	42
a. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 1 Juni 2011	43
b. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 2 Juni 2011	49
c. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 3 Juni 2011	54
d. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 4 Juni 2011	60
e. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 5 Juni 2011	67
f. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 6 Juni 2011	71
g. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 22 Juni 2011	74
h. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 24 Juni 2011	77
i. <i>Haedline</i> Riau Pos Edisi 25 Juni 2011	79
BAB IV Analisi Data	84
A. Penerapan Diksi Dalam Bahasa Jurnalistik	85
B. Analisis Penerapan Diksi Dalam Bahasa Jurnalistik Pada Berita	
<i>Headline</i> Surat Kabar Riau Pos	89
a. Analisa <i>Headline</i> Edisi 1 Juni 2011	90
b. Analisa <i>Headline</i> Edisi 2 Juni 2011	100
c. Analisa <i>Headline</i> Edisi 3 Juni 2011	104
d. Analisa <i>Headline</i> Edisi 4 Juni 2011	110
e. Analisa <i>Headline</i> Edisi 5 Juni 2011	115
f. Analisa <i>Headline</i> Edisi 6 Juni 2011	119
g. Analisa <i>Headline</i> Edisi 22 Juni 2011	121
h. Analisa <i>Headline</i> Edisi 23 Juni 2011	123
i. Analisa <i>Headline</i> Edisi 24 Juni 2011	123
BAB V Penutup	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	130

B. Analisis Penerapan Diksi dalam Bahasa Jurnalistik pada *Headline* Surat Kabar Riau Pos.

Tabel I

Riau Pos Edisi 1 Juni 2011

Judul: Menpora Cari Aman

Paragraf	Berita	Analisis
1	MENPORA Andi mallarangeng menepati janjinya <u>untuk datang</u> memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (31/5), terkait kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011	Kalimat pada judul berita <u><i>Menpora Cari Aman</i></u> terdapat penggunaan kata abstrak pada kata <u><i>Aman</i></u> . kata tersebut dapat memunculkan distorsi. Dari judul dapat dilihat si wartawan menulis berdasar kerangka berfikir narasumber sehingga terkesan adanya keberpihakan dan empati wartawan terhadap narasumber tersebut, hal ini

	<p>Palembang yang menyeret <u><i>anak buahnya</i></u> Sesmenpora Wafid Muharam sebagai tersangka.</p>	<p>dapat merugikan pihak lain. Sebaiknya kata <u><i>Aman</i></u> di konkritkan menjadi <u><i>Bantah Pengakuan Wafid</i></u></p> <p>Penggalan lead berita diatas pada baris pertama terdapat kata tidak lugas pada kalimat <u><i>untuk datang.</i></u> Kalimat tersebut sebaiknya dihilangkan saja, karena kata berikutnya sudah menjelaskan Menpora bakal datang ke KPK.</p> <p>Lalu penggunaan kata bernilai rasa pada kata <u><i>anak buah</i></u> untuk mengatakan bawahan tidak tepat digunakan dalam lembaga resmi. Sebaiknya kata anak buah diganti dengan <u><i>bawahan.</i></u></p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Menpora Bantah Pengakuan Wafid</p> <p>MENPORA Andi Mallarangeng menepati janjinya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (31/5),</p>
--	---	---

		terkait kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang yang menyeret bawahannya Sesmenpora Wafid Muharam sebagai tersangka.
2	Dia langsung menepis pengakuan Sesmenpora Wafid <u>bahwa</u> dia memberi persetujuan terkait penggunaan dana talangan. “ Saya tak pernah di lapori,” katanya. Kubu tersangka Sesmenpora Wafid Muharam <u>pun</u> menyayangkan pengakuan Andi yang tak mengetahui penggunaan dana talangan di Kemenpora. Erman Umar, Kuasa Hukum Wafid mengatakan, Andi mencari aman. “ Bisa jadi Pak	<p>Dari berita paragraf kedua terdapat kata umum pada kata <u>bahwa</u>, kata bahwa sebenarnya tidak mengandung arti, sebaiknya diganti dengan kata khusus <u>yang mengatakan</u> agar maksud dari kalimat sebelumnya lebih jelas, karena ini merupakan sebuah pengakuan dari Sesmenpora.</p> <p>Lalu penggunaan partikel <u>pun</u> sebaiknya dihilangkan saja agar kalimat yang disampaikan lebih lugas.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Dia langsung menepis pengakuan Sesmenpora Wafid yang mengatakan dia memberi persetujuan terkait penggunaan dana</p>

	Mentri (Andi) khawatir kalau dia disangkutkan dalam perkara ini, “ kata Umar.	talangan. “ Saya tak pernah di lapori,” katanya. Kubu tersangka Sesmenpora Wafid Muharam menyayangkan pengakuan Andi yang tidak mengetahui penggunaan dana talangan di Kemenpora. Erman Umar, Kuasa Hukum Wafid mengatakan, Andi mencari aman. “ Bisa jadi Pak Mentri (Andi) khawatir kalau dia disangkutkan dalam perkara ini, “ kata Umar.
3	Menurut Andi, Kemenpora selama ini tak pernah mengeluarkan kebijakan <u>untuk</u> menggunakan dana talangan dalam proyek-proyek Kemenpora.	Menggunakan kata <u>untuk</u> pada kalimat diatas membuat tulisan tidak lugas, sebaiknya dihilangkan saja agar tulisan lebih lancar dan enak dibaca.
4	Sekretraris Dewan Pembina Demokrat itu	Penggunaan kata <u>kaget</u> merupakan kata non baku, dapat diganti

	<p>juga membantah tudingan bahwa dia adalah pelapor peristiwa suap yang dilakukan Mohammad El Idris ke Wafid melalui Mindo Rosalina Manulang. Bahkan, Andi <u>mengaku kaget</u> mendengar peristiwa itu.</p>	<p>sinonimnya dengan kata baku menjadi <u>terkejut</u>. Lalu kata <u>mengaku</u> sebaiknya dihilangkan saja agar lebih lugas.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Sekretraris Dewan Pembina Demokrat itu juga membantah tudingan bahwa dia adalah pelapor peristiwa suap yang dilakukan Mohammad El Idris ke Wafid melalui Mindo Rosalina Manulang. Bahkan, Andi terkejut mendengar peristiwa itu.</p>
5	<p><u>Begitu datang</u> dia langsung masuk ke gedung KPK untuk menemui para penyidik <u>tanpa banyak bicara</u></p>	<p><u>Kata begitu datang</u> dan <u>tanpa banyak bicara</u> merupakan kata mubazir, sebaiknya dihilangkan saja agar tulisan menjadi lugas dan enak dibaca.</p> <p><i>Seperi:</i></p> <p>dia langsung masuk ke gedung KPK untuk menemui para penyidik</p>

8	<p><u>Seperti diketahui</u>, mantan Sesmenpora yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka Wafid Muharam selalu menyampaikan <u>bahwa</u> uang Rp 3,2 Miliar yang diperoleh dari PT Duta Graha Indah adalah dana talangan.</p>	<p><u>Seperti diketahui</u> merupakan kata transisi dari paragraph pembuka, tapi sebenarnya kata ini tidak mengandung arti, ia hanya membuat tulisan semakin gemuk. Jadi penggunaan kata ini mubazir, sebaiknya dihilangkan saja. Lalu penggunaan kata <u>bahwa</u> juga mebazir karena tidak mengandung arti, jika dihilangkan tidak mempengaruhi kalimat sebelumnya.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Mantan Sesmenpora yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka Wafid Muharam selalu menyampaikan uang Rp 3,2 Miliar yang diperoleh dari PT Duta Graha Indah adalah dana talangan</p>
9	<p><u>Namun saat ditanya tentang dugaan</u> keterlibatan Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekannya di demokrat, Andi lebih</p>	<p><u>Namun saat ditanya tentang dugaan</u>. Sebaiknya dihilangkan saja, dan diganti dengan kata <u>Terkait</u>. Agar lebih lugas penyampaiannya.</p> <p><i>Seperti:</i></p>

	memilih tutup mulut. “Sudah, sudah,” jawabnya lalu masuk ke mobil dinasny.	Terkait keterlibatan Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekannya di demokrat, Andi lebih memilih tutup mulut. “Sudah, sudah,” jawabnya lalu masuk ke mobil dinasny.
10	Menurutnya kuasa hukum Wafid, Erman Umar, tak mungkin Andi tak tahu adanya dana talangan pada proyek Sea Games 2011. Sebab, dalam beberapa kali rapat yang diikuti Menpora, Wafid selalu mengungkapkan <u>bahwa</u> perhelatan Sea Games di Tanah Air perlu dana <u>yang sangat luar biasa</u> . Di rapat-rapat itu pun Wafid mengaku perlu dana talangan untuk proyek pembangunan Wisma Atlet.	Sebaiknya kata <u>bahwa</u> dihilangkan saja. Kata <u>yang sangat luar biasa</u> sebaiknya dikhususkan menjadi Rp <u>3,2 miliar</u> . Agar lebih jelas nominal dari nilai dana tersebut. Lalu kata <u>rapat-rapat</u> , langsung saja gunakan kata <u>rapat</u> <i>Seperti:</i> Menurutnya kuasa hukum Wafid, Erman Umar, tidak mungkin Andi tidak tahu adanya dana talangan pada proyek Sea Games 2011. Sebab, dalam beberapa kali rapat yang diikuti Menpora, Wafid selalu mengungkapkan perhelatan Sea Games di Tanah Air perlu dana 3,2

		miliar. Di rapat itu pun Wafid mengaku perlu dana talangan untuk proyek pembangunan Wisma Atlet.
13	<p>Wakil ketua KPK M Jasin <u>menegaskan</u>, pihaknya menghargai Andi karena memenuhi panggilan <u>pihaknya untuk dimintai keterangan</u>. Menurutnya, KPKsangat perlu keterangan dari Menpora terkait kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet. <u>Dikatakan</u>, status Andi adalah sebagai saksi. Andi diperiksa untuk keperluan pengembangan kasus ini. Namun dia enggan menerangkan materi apa saja yang ditanyakan ke Andi.</p>	<p>Kata <u>menegaskan</u> sebaiknya diganti dengan kata yang tepat, sebab tidak ada kontroversi yang terjadi dalam kasus ini soal kedatangan Andi. Kata yang netral digunakan pada kalimat ini adalah <u>mengatakan</u>. Selanjutnya pada kalimat <u>pihaknya</u>, terjadi pengulangan kata dari kalimat sebelumnya. Sebaiknya diganti dengan <u>KPK</u>. Lalu <u>untuk dimintai keterangan</u> juga sebaiknya dihilangkan agar lebih lugas. Juga terjadi pengulangan kalimat sebelumnya. Kata <u>Dikatakan</u> sebaiknya dihilangkan karena masih dalam pernyataan narasumber.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Wakil ketua KPK M Jasin mengatakan pihaknya menghargai</p>

		<p>Andi karena memenuhi panggilan KPK. Menurutnya, KPK sangat perlu keterangan dari Menpora terkait kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet. Status Andi adalah sebagai saksi. Andi diperiksa untuk keperluan pengembangan kasus ini. Namun dia enggan menerangkan materi apa saja yang ditanyakan ke Andi.</p>
14	<p>Juru bicara KPK Johan Budi menegaskan pihaknya akan memeriksa semua pihak yang <u>memiliki keterkaitan erat dengan</u> kasus ini. Memang, kemarin giliran KPK memeriksa Menpora. KPK memanggil Andi karena memiliki <u>bahan-bahan tertentu</u> yang diperlukan untuk memanggilnya. Jadi penyidik KPK tak begitu</p>	<p>Kalimat <u>memiliki keterkaitan erat</u> terlalu mubazir, sebaiknya diganti dengan kata <u>terlibat</u> agar lebih lugas</p> <p>Seperti:</p> <p>Juru bicara KPK Johan Budi menegaskan pihaknya akan memeriksa semua pihak teribat kasus ini. Memang, kemarin giliran KPK memeriksa Menpora.</p>

	saja memanggil orang-orang yang terkait tanpa ada alasan dan bahan yang mencukupi.	
15	<p><u><i>Apa ada kemungkinan Menpora akan dipanggil lagi? “Oh bisa saja,” jawab johan.</i></u></p> <p><u><i>Itu dilakukan bila nantinya ada perkembangan lain yang memerlukan kembali keterangan</i></u></p>	Paragraf diatas sebaiknya dipenggal saja, karena mubazir kata. Berita terkait dijelaskan lebih detil pada paragraf enam belas.
16	Johan mengatakan, <u><i>nantinya</i></u> keterangan Andi <u><i>yang diberi kemarin</i></u> akan dikonfrontasi dengan pihak-pihak lain. Jika <u><i>nanti</i></u> setelah itu keterangan Andi dan tersangka tak sesuai, maka tak menutup kemungkinan KPK akan kembali memanggil Andi.	<p>Kata <u><i>nantinya</i></u> sebaiknya dihilangkan saja, begitu juga dengan kata yang <u><i>diberi kemarin</i></u>. Terjadi pengulangan kata <u><i>nanti</i></u>. Kata-kata tersebut terlalu mubazir sebaiknya dihilangkan saja agar tidak menjemukan pembaca.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Johan mengatakan, keterangan Andi akan dikonfrontasi</p>

		dengan pihak-pihak lain. Jika setelah itu keterangan Andi dan tersangka tidak sesuai, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan kembali memanggil Andi.
17	Johan mengaku KPK belum ada rencana <u>tentang kemungkinan</u> memanggil Andi dan tersangka kasus suap Sesmenpora secara bersamaan untuk dikonfrontasi.	Kata tidak lugas pada kalimat <u>tentang kemungkinan</u> sebaiknya dihilangkan saja. <i>Seperti:</i> Johan mengaku KPK belum ada rencana memanggil Andi dan tersangka kasus suap Sesmenpora secara bersamaan untuk dikonfrontasi.
20	Kini <u>adalah</u> saat yang tepat memanggil Andi mallarangeng.	Kata <u>adalah</u> merupakan kata mubazir, menurut Rosihan Anwar, kata <u>adalah</u> masuk dalam kata sambung yang tidak fungsional , sebaiknya

		<p>dihilangkan saja agar tulisan menjadi lugas.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Kini saat yang tepat memanggil Andi Mallarangeng.</p>
22	<p><u>Saat ditanya apakah KPK segera meminta pencabutan paspor untuk Nazaruddin yang hingga kini masih ada di Singapura,</u></p> <p>Johan mengatakan belum perlu. <u>Setakat</u> ini belum ada itu seperti yang dilakukan KPK terhadap Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek perjalanan pemenangan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom.</p>	<p>Tidak perlu ditulis pertanyaan wartawan dalam menulis berita, karena akan membuat tulisan semakin gemuk. kalimat tersebut bisa di penggal menjadi kalimat lugas. lalu kata <u>setakat</u> merupakan kata non baku yang maknanya tidak umum dimengerti oleh masyarakat, sebaiknya diganti sinonimnya dengan kata <u>sementara</u>.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Johan mengatakan sementara ini belum ada tindakan pencabutan paspor Nazaruddin yang masih di singapura. seperti yang dilakukan KPK terhadap Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek</p>

		perjalanan kemenangan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom.
23	Namun, <u>bagaimanapun juga</u> , KPK tetap berharap Nazaruddin segera kembali ke Tanah Air <u>sehingga nanti</u> bisa memenuhi panggilan sebagai saksi demi kelancaran pengungkapan kasus suap Sesmenpora.	Terjadi mubazir kata pada <u>bagaimanapun juga</u> , sebaiknya dihilangkan saja. Lalu kata <u>sehingga nanti</u> dapat diefisienkan dengan kata <u>supaya</u> . <i>Seperti:</i> Namun, KPK tetap berharap Nazaruddin segera kembali ke Tanah Air <u>supaya</u> bisa memenuhi panggilan sebagai saksi demi kelancaran pengungkapan kasus suap Sesmenpora.

Tabel II

Riau Pos Edisi 2 Juni 2011

Judul: KPK Cekar Hatta Rajasa

Paragraf	Berita	Analisis
1	KPK <u>Cekar</u> Hatta Rajasa	Kalimat dari judi KPK <u>Cekar</u> Hatta Rajasa terdengar sangat profokatif (berlebihan). Terlihat pada kata <u>cekar</u> , yang memiliki kesan makna di Tanya habis-habisan dan membutuhkan waktu yang cukup lama (lebih dari 12 Jam). Namun, sebenarnya pada pemberitaan ini Hatta Rajasa hanya diperiksa selama 15 menit. Pemanggilan Hatta hanya sebatas kebetulan saja, bukan pemeriksaan secara intensif. Jadi kata <u>cekar</u> lebih tepat diganti dengan <u>periksa</u> . Atau <u>Panggil</u>

		<p><i>Seperti:</i></p> <p>KPK Periksa Hatta Rajasa</p>
2	<p>Hatta diperiksa terkait dugaan kasus korupsi kereta rel listrik (KRL) hibah dari jepang pada 2006 saat dia menjabat Menteri Perhubungan. <u>Namun</u> calon besan Presiden SBY ini tak menggunakan mobil dinas kementerian saat tiba ke gedung KPK sekitar pukul 7.30 WIB.</p>	<p>Kata <u>namun</u> merupakan kata sambung sebagai penghubung induk kalimat ke induk kalimat (setara). Dalam ha ini masuk dalam kategori kata sambung bertentangan. Dalam kalimat ini sebaiknya kata dihilangkan saja karena tidak ada kaitan antara induk kalimat dengankalimat berikutnya.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Hatta diperiksa terkait dugaan kasus korupsi kereta rel listrik (KRL) hibah dari jepang pada 2006 saat dia menjabat Menteri Perhubungan. Calon besan Presiden SBY ini tak menggunakan mobil dinas kementerian saat tiba ke gedung KPK sekitar pukul 7.30 WIB.</p>

4	<u>Seperti diketahui</u> , kasus hibah KRL ini sudah menyeret mantan Dirjen Perkeretaapian Sumino Eko Saputro sebagai tersangka.	<u>Seperti diketahui</u> merupakan kata transisi, Rosihan Anwar mengatakan kata-kata ini merupakan Kata Penat, sebenarnya tidak mengandung arti, ia hanya membuat tulisan semakin gemuk. sebaiknya dihilangkan saja.
7	Namun saat ditanya tentang keterlibatan adik kandungnya, Hatta lebih memilih bungkam. “Itu soal materi, coba Tanya ke penyidik,” katanya lalu <u>tergesa-gesa</u> masuk ke mobil.	Kata <u>tergesa-gesa</u> bisa diganti sinonimnya dengan kata yang lebih singkat yaitu <u>bergegas</u> . Kata ini lebih efektif dalam ekonomi kata agar berita yang di tulis lebih lugas penyampaiannya. <i>Seperti:</i> Namun saat ditanya tentang keterlibatan adik kandungnya, Hatta lebih memilih bungkam. “Itu soal materi, coba Tanya ke penyidik,” katanya lalu <u>tergesa-gesa</u> masuk ke mobil.
8	. Dalam pemeriksaan <u>yang tergolong</u>	Kalimat <u>yang tergolong</u> sebaiknya dihilangkan saja, karena terjadi

	<p>singkat itu, politisi PAN itu hanya ditanya tentang persetujuannya dalam hibah pengadaan KRL eks jepang.</p>	<p>pemborosan pada kata.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Dalam pemeriksaan singkat itu, politisi PAN itu hanya ditanya tentang persetujuannya dalam hibah pengadaan KRL eks jepang.</p>
10	<p>Wakil ketua KPK, M Jasin <u>menegaskan</u>, singkatnya pemeriksaan Hatta itu tak terkait dengan kesibukkan Hatta sebagai <u>seorang</u> menteri. Pemanggilannya kemarin hal yang kebetulan dan Hatta bisa memenuhinya.</p>	<p>Kata <u>menegaskan</u> sebaiknya diganti dengan kata yang lebih netral yakni <u>mengatakan</u>. Karena narasumber member penjelasan yang sifatnya bukan kontroversi. Kata <u>seorang</u> sebaiknya dihilangkan saja, karena kata menteri sudah mewakili sebuah profesi seseorang.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Wakil ketua KPK, M Jasin <u>mengatakan</u>, singkatnya pemeriksaan Hatta itu tak terkait dengan kesibukkan Hatta sebagai menteri.</p>

11	Negara diduga <u>menderita</u> kerugian hingga Rp 44,4 miliar. Kasus berawal ketika 1998-1999, di Jepang banyak KRL tak bisa beroperasi akibat adanya UU lingkungan hidup yang melarang penggunaan <i>refrigen Freon</i> pada AC kereta. Akhirnya, banyak KRL <u>yang</u> dihibahkan atau dijual ke Negara lain.	<p>Kata <u>menderita</u> tidak tepat digunakan untuk menyatakan kerugian Negara, sinonim lebih tepatnya <u>mengalami</u>, menderita biasanya digunakan untuk pernyataan suatu penyakit. Terjadi pemborosan pada kata <u>yang</u> sebaiknya dihilangkan saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Negara diduga <u>mengalami</u> kerugian hingga Rp 44,4 miliar. Kasus berawal ketika 1998-1999, di Jepang banyak KRL tak bisa beroperasi akibat adanya UU lingkungan hidup yang melarang penggunaan <i>refrigen Freon</i> pada AC kereta. Akhirnya, banyak KRL dihibahkan atau dijual ke Negara lain.</p>
17	<u>Sementara itu</u> , Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S	<u>Sementara itu</u> , merupakan kata transisi dari paragraf pembuka atau lebih dikenal dengan Kata Penat, tapi sebenarnya kata ini tidak

	<p>Ervan <u>menambahkan</u>, awal informasi adanya KRL bekas milik jepang itu disampaikan JARTS (lembaga <i>semi-government</i> di Jepang) pada 14 Juli 2006.</p>	<p>mengandung arti, ia hanya membuat tulisan semakin gemuk. Jadi penggunaan kata ini mubazir, sebaiknya dihilangkan saja. Lalu kata menambahkan sebaiknya diganti dengan <u>mengatakan</u>.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan <u>mengatakan</u> awal informasi adanya KRL bekas milik jepang itu disampaikan JARTS (lembaga <i>semi-government</i> di Jepang) pada 14 Juli 2006.</p>

Tabel III

Riau Pos Edisi 3 Juni 2011

Judul: KPK Tangkap Hakim Suap

Paragraf	Berita	Analisis
3	<p><u>Menurut</u> juru bicara KPK, Johan Budi, setelah menangkap. KPK langsung menggeledah rumah Syarifuddin. Hasilnya, ditemukan uang Rp.392 juta <u>dari jumlah itu</u>, diduga uang suap dari Pugu.</p>	<p>Kata <u>menurut</u> sebaiknya diganti padanannya dengan kata <u>menjelaskan</u>, karena dalam hal ini narasumber tidak memberikan pendapatnya, melainkan menjelaskan keadaan yang terjadi. Kalimat <u>dari jumlah itu</u> mengalami mubazir kata, sebaiknya dihilangkan saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Juru bicara KPK, Johan Budi <u>menjelaskan</u>, setelah menangkap. KPK langsung menggeledah rumah Syarifuddin. Hasilnya, ditemukan uang Rp.392 juta, diduga uang suap dari Pugu.</p>

4	<p>Selain dalam bentuk rupiah, KPK juga menyita mata uang asing, yakni 116.128 dolar AS, 245 ribu dolar Singapura, 12.600 KHR (Mata uang Kamboja) dan 20 ribu yen Jepang. Duit <u>dalam pecahan mata uang asing</u> itu ditemukan saat tim penyidik menggeledah lemari dalam pakaian didalam kamar. <u>Sebagian besar</u> uang disimpan disaku-saku pakaian milik Syarifuddin. Semuanya kami sita” untuk kepentingan penyidik” kata Johan. <u>Menurut</u> Johan, KPK juga akan menelusuri apakah mata uang asing yang ditemukan terpisah itu terkait</p>	<p>Kalimat <u>dalam pecahan mata uang asing</u> sebaiknya dihilangkan saja karena terjadi pengulangan kata yang mengakibatkan kejenuhan pada diri pembaca. <u>Sebagian besar</u> diganti dengan <u>kebanyakan</u>. Kata <u>Menurut</u> lebih tepat diganti dengan <u>menjelaskan</u>, karena narasumber memberikan keterangan soal rencana berikutnya.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Duit itu ditemukan saat tim penyidik menggeledah lemari dalam pakaian didalam kamar. <u>Kebanyakan</u> uang disimpan disaku-saku pakaian milik Syarifuddin. Semuanya kami sita” untuk kepentingan penyidik” kata Johan. Johan <u>menjelaskan</u>, KPK juga akan menelusuri apakah mata uang asing yang ditemukan terpisah itu terkait dengan kasus Kepailitan PT SCI atau kasus penyuapan</p>

	dengan kasus Kepailitan PT SCI atau kasus penyuapan lainnya. Namun tak menutup kemungkinan, itu adalah uang Syarifuddin yang didapat dengan cara yang sah.	lainnya. Namun tak menutup kemungkinan, itu adalah uang Syarifuddin yang didapat dengan cara yang sah.
5	Dua buah <i>handphone</i> juga <u>turut</u> diamankan <u>dari rumah Syarifuddin</u> ” itu diluar <i>handphone</i> yang dipegang” sebut Johan.	Kata <u>turut</u> merupakan kata mubazir, ia memiliki makna sama dengan kata <i>juga</i> , sebaiknya dihilangkan saja agar lebih lugas penyampaianya. Begitu juga untuk kata <u>dari rumah Syarifuddin,</u> sebaiknya dihilangkan saja karena telah terjadi pengulangan dari tulisan sebelumnya. <i>Seperti:</i> Dua buah <i>handphone</i> juga diamankan_” itu diluar <i>handphone</i> yang dipegang” sebut Johan.

6	<p><u>Dikatakan</u>, penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat. Tim KPK sudah mengintai sejak Rabu (1/6) siang. <u>Masih dihari yang sama</u> sekitar pukul 20.00 Puguh bertamu kerumah Syarifuddin di Jalan Sunter Agung Tengah C/26 Jakarta Utara. Sekitar pukul 22.00, terjadi penyerahan uang dari Puguh ke Syarifuddin, <u>uangnya diserahkan</u> dalam 3 buah amplop berwarna cokelat yang diletakkan didalam tas kertas.</p>	<p>Kata tidak lugas terdapat pada kata <u>Dikatakan, masih dihari yang sama dan uangnya diserahkan</u>, sebaiknya kata ini dihilangkan karena mubazir dan terjadi pengulangan kata pada kalimat sebelumnya.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat. Tim KPK sudah mengintai sejak Rabu (1/6) siang. Sekitar pukul 20.00 Puguh bertamu kerumah Syarifuddin di Jalan Sunter Agung Tengah C/26 Jakarta Utara. Sekitar pukul 22.00, terjadi penyerahan uang dari Puguh ke Syarifuddin, dalam 3 buah amplop berwarna cokelat yang diletakkan didalam tas kertas.</p>
7	<p><u>Tak berselang lama</u> setelah penyerahan,</p>	<p><u>Kata tak berselang lama</u> sebaiknya dihilangkan saja agar lebih</p>

	Puguh pergi dari rumah Syarifuddin. Tim KPK pun langsung menangkap Syarifuddin.	<p>lugas penyampaianya, karena tidak mempengaruhi makna kalimat berikutnya.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>setelah penyerahan, Puguh pergi dari rumah Syarifuddin. Tim KPK pun langsung menangkap Syarifuddin.</p>
8	Diduga, peran kurator Puguh adalah <u>untuk</u> melobi Syarifuddin. Untuk memuluskan keinginannya,	<p>Kata <u>untuk</u> sebaiknya dihilangkan saja Karena kerap terjadi pengulangan kata.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Diduga, peran kurator Puguh adalah melobi Syarifuddin untuk memuluskan keinginannya.</p>
9	<u>Sedang Syarifuddin dan Puguh saat</u>	Terjadi kerancuan (kacau) SPOK pada kalimat pembuka, karena

<p><u>hendak</u> dibawa ke Rutan sekitar pukul 18.40 petang kemarin, terlihat letih. Setelah menjalani pemeriksaan panjang, keduanya memilih bungkam. Syarifuddin yang mengenakan kaus berkerah warna abu-abu kombinasi hitam, sepertinya tak bisa menutupi rasa malunya. Wajahnya tampak tegang. Ia terus menutupi <u>wajahnya</u> dengan bungkus plastik <u>yang ada</u> ditangannya dari jepretan dan sorot kamera para wartawan.</p>	<p>penggunaan kata tidak lugas pada kata <u>Sedang Syarifuddin dan Puguh saat hendak</u>, kalimat ini bisa dirampingkan dengan kata <u>mereka</u>. Lalu terjadi pengulangan pada kata <u>wajahnya</u>, pemborosan kata pada <u>yang ada</u>, sebaiknya kata ini dihilangkan saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Mereka terlihat letih saat dibawa ke Rutan sekitar pukul 18.40 petang kemarin. Setelah menjalani pemeriksaan panjang, keduanya memilih bungkam. Syarifuddin yang mengenakan kaus berkerah warna abu-abu kombinasi hitam, sepertinya tak bisa menutupi rasa malunya. Wajahnya tampak tegang. Ia terus menutupi wajahnya dengan bungkus plastik yang ada ditangannya dari jepretan dan sorot kamera para wartawan.</p>
--	---

10	Ia tidak mengeluarkan satu patah kata pun meski wartawan memberondongnya <u>dengan berbagai</u> pertanyaan. Ia terpaksa berdesak-desakan dengan jurnalis foto sebelum <u>akhirnya</u> masuk mobil tahanan.	Kata tidak lugas terdapat pada kata <u>dengan berbagai</u> dan <u>akhirnya</u> , sebaiknya dihilangkan saja. <i>Seperti:</i> Ia tidak mengeluarkan satu patah kata pun meski wartawan memberondongnya pertanyaan. Ia terpaksa berdesak-desakan dengan jurnalis foto sebelum masuk mobil tahanan.
14	Bahkan melihat pengunjung <u>yang</u> memainkan ponsel didalam ruangan sidang, dia tak segan menegur hingga mengusir ke luar ruangan. PN Jakarta Pusat menyatakan belum <u>akan</u> mengambil sikap terkait kasus suap tapi siap memberi pembelaan hukum bagi yang	Pemborosan kata pada <u>yang</u> , <u>akan</u> sebaiknya dihilangkan saja. Kata <u>urai</u> tidak tepat digunakan untuk keterangan narasumber, sebaiknya gunakan kata <u>jelas</u> atau <u>kata</u> . Lalu kata <u>Dikatakan</u> sebaiknya dihilangkan saja karena masih dalam keterangan narasumber, agar kalimat menjadi lugas penyampaiannya. <i>Seperti:</i>

<p>bersangkutan. “penyikapan akan kami tentukan setelah kami lapor ke Ketua PN Pusat. Dia berhak dapat pembelaan hukum. Tentu nanti akan kami bicarakan dengan beliau,” <u>urai</u> Humas PN Jakarta Pusat Suwidya. <u>Dikatakan</u> pihaknya tahu perihal penangkapan Syarifuddin dari media.</p>	<p>Bahkan melihat pengunjung memainkan ponsel didalam ruangan sidang, dia tak segan menegur hingga mengusir ke luar ruangan. PN Jakarta Pusat menyatakan belum mengambil sikap terkait kasus suap tapi siap memberi pembelaan hukum bagi yang bersangkutan. “penyikapan akan kami tentukan setelah kami lapor ke Ketua PN Pusat. Dia berhak dapat pembelaan hukum. “Tentu nanti akan kami bicarakan dengan beliau,” <u>kata</u> Humas PN Jakarta Pusat Suwidya. Pihaknya tahu perihal penangkapan Syarifuddin dari media.</p>
--	--

Tabel IV

Riau Pos Edisi 4 Juni 2011

Judul : Hakim Suap Bebaskan Koruptor

Paragraf	Berita	Analisis
1	<p>PENANGKAPAN Hakim Syarifuddin Umar atas kasus suap <u>terkait kasus</u> kepailitan PT Sky Camping Indonesia (SCI) memperburuk citra peradilan Indonesia.</p>	<p>Terdapat kata tidak lugas dan pengulangan kata pada <u>terkait kasus</u> sebaiknya kata ini dihilangkan saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>PENANGKAPAN Hakim Syarifuddin Umar atas kasus suap kepailitan PT Sky Camping Indonesia (SCI) memperburuk citra peradilan Indonesia.</p>
2	<p>Mulai kasus korupsi kredit fiktif BNI dengan nilai kerugian Negara sebanyak Rp. 27</p>	<p>Terjadi pengulangan kata <u>dengan</u> sehingga menjemukan pembaca. Sebaiknya diganti dengan kata <u>oleh</u>.</p>

	miliar <u>dengan</u> terdakwa yang dibebaskan yakni Basri Adbah (direktur PT A'Tiga).	<p><i>Seperti:</i></p> <p>Mulai kasus korupsi kredit fiktif BNI dengan nilai kerugian Negara sebanyak Rp. 27 miliar <u>oleh</u> terdakwa yang dibebaskan yakni Basri Adbah (direktur PT A'Tiga).</p>
4	Jasin <u>menegaskan</u> kini komisinya masih kosentrasi menyelidiki Syarifuddin dalam kasus dugaan suap PT SCI.	<p>Kata menegaskan tidak tepat digunakan untuk sebuah keterangan yang belum menjadi kontroversi. Sebaiknya diganti padanannya menjadi <u>mengatakan.</u></p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Jasin <u>menegaskan</u> kini komisinya masih kosentrasi menyelidiki Syarifuddin dalam kasus dugaan suap PT SCI.</p>
5	Terkait penyelesaian kasus suap itu	Kata <u>sendiri</u> tidak memiliki makna apapun, sebaiknya dihilangkan

	<p><u>sendiri</u>, pimpinan KPK bidang pencegahan ini <u>menguraikan</u> pihaknya segera minta keterangan Syarifuddin dan Kurator Puguh Wirawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan.</p>	<p>saja. Lalu kata menguraikan tidak tepat digunakan untuk keterangan yang bukan data. Sebaiknya diganti padanannya dengan kata <u>mengatakan</u>.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Terkait penyelesaian kasus suap itu, pimpinan KPK bidang pencegahan ini <u>mengatakan</u> pihaknya segera minta keterangan Syarifuddin dan Kurator Puguh Wirawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan.</p>
7	<p><u>Sementara itu</u>, sebelum kasus suap ini terjadi. Syarifuddin ternyata memiliki sejumlah catatan miring dalam perjalanan karirnya dan direkam Indonesia Corruption Watch (ICW).</p>	<p><u>Sementara itu</u> selalu digunakan sebagai kata transisi atau yang lebih populer disebut Kata Penat. dalam memulai paragraf, namun sejatinya kata ini tidak memiliki makna apapun, sebaiknya dihilangkan saja. <i>Seperti:</i></p> <p>Sebelum kasus suap ini terjadi. Syarifuddin ternyata memiliki sejumlah catatan miring dalam perjalanan karirnya dan direkam</p>

		Indonesia Corruption Watch (ICW).
9	Emerson <u>menegaskan</u> terdapat dugaan praktik suap dalam pembebasan Agusrin.	<p>Kata <u>menegaskan</u> tidak tepat untuk keterangan yang tidak menjadi kontroversi atau diperdebatkan, sebaiknya gunakan kata yang netral seperti <u>mengatakan</u>.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Emerson <u>mengatakan</u> terdapat dugaan praktik suap dalam pembebasan Agusrin.</p>
10	Termasuk vonis bebas Agusrin Najamuddin. <u>Disamping</u> itu lanjut Emerson. Proses penyidikan terhadap tersangka kasus suap	<p>Kata <u>disamping itu</u> sebaiknya dihilangkan saja, ia merupakan kata penat yang tidak ada makna apapun. Kata <u>ini untuk</u> terlalu rancu, sebaiknya diganti padanannya menjadi <u>supaya</u>.</p>

	tersebut harus diurus sendiri oleh KPK. <u>Ini</u> <u>untuk</u> memastikan proses hukum yang cepat dan menutup peluang korupsi dan kolusi didalamnya. “tidak melimpahkan pada Kejaksaan atau kepolisian.” imbuhnya.	<p><i>Seperti:</i></p> <p>Termasuk vonis bebas Agusrin Najamuddin. Proses penyidikan terhadap tersangka kasus suap tersebut harus diurus sendiri oleh KPK. <u>Supaya</u> memastikan proses hukum yang cepat dan menutup peluang korupsi dan kolusi didalamnya. “tidak melimpahkan pada Kejaksaan atau kepolisian.” imbuhnya.</p>
11	Sebagai hakim PN Jakarta Pusat, Syarifuddin <u>nyaris</u> saja diangkat jadi Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Mahkamah Agung (MA).	<p>Kata nyaris tidak tepat digunakan untuk keterangan yang bukan kecelakaan atau musibah. Dalam hal ini sebaiknya menggunakan kata <u>hampir</u>.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Sebagai hakim PN Jakarta Pusat, Syarifuddin <u>hampir saja</u> diangkat jadi Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi</p>

		(Tipikor) oleh Mahkamah Agung (MA).
13	<u>Dibagian lain,</u> tersangka Syarifuddin malalui kuasa hukumnya Jummart Girsang menyatakan tak terima disebut tertangkap tangan oleh KPK. Junimart <u>menguraiakan</u> klainnya justru merasa dijebak KPK.	<u>Dibagian lain</u> merupakan kata transisi atau kata penat, ia tidak memiliki makna apapun, sebaiknya dihilangkan saja agar tulisan lebih lugas penyampaiannya. Kata <u>menguraiakan</u> tidak tepat digunakan untuk keterangan yang bukan data, sebaiknya diganti padanannya menjadi <u>mengatakan</u> . <i>Seperti:</i> Tersangka Syarifuddin malalui kuasa hukumnya Jummart Girsang menyatakan tak terima disebut tertangkap tangan oleh KPK. Junimart <u>mengatakan</u> klainnya justru merasa dijebak KPK.
15	Namun pada kasus <u>Syariffuddin</u> kliennya	nama <u>Syariffuddin</u> tidak perlu lagi digunakan, karena sudah

	itu tak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum saat ditangkap KPK.	<p>diterangkan latarbelakangnya pada kalimat berikutnya. Sebaiknya dihilangkan saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Namun pada kasus kliennya itu tak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum saat ditangkap KPK.</p>
17	<u><i>Seperti diketahui</i></u> KPK menangkap syaifuddin dikediamannya di Kawasan Pancoran, Jakarta Utara pada Rabu malam (1/6).	<p>Kata <u><i>seperti diketahui</i></u> merupakan kata transisi atau kata penat, ia tidak punya makna apapun, sebaiknya dihilangkan saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>KPK menangkap syaifuddin dikediamannya di Kawasan Pancoran, Jakarta Utara pada Rabu malam (1/6).</p>

Tabel V

Riau Pos Edisi 5 Juni 2011

Judul: Senin, Syarifuddin di non aktifkan

Paragraf	Berita	Analisis
1	<p>KASUS suap <u>terhadap</u> Hakim Syarifuddin terkait kepailitan PT Sky Camping Indonesia (Sky) menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung. Desakan dari sejumlah pihak <u>pun</u> agar Syarifuddin segera diberhentikan, direspon cepat oleh Lembaga Peradilan Tertinggi tersebut.</p>	<p>Kata <i>terhadap</i> sebaiknya dihilangkan saja, karena tidak mempengaruhi makna. Lalu penggunaan partikel <u>pun</u> hanya membuat kalimat semakin boros. Sebaiknya dihilangkan saja agar penyampaian menjadi lugas.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>KASUS suap Hakim Syarifuddin terkait kepailitan PT Sky Camping Indonesia (Sky) menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung. Desakan dari sejumlah pihak agar Syarifuddin segera diberhentikan, direspon cepat oleh Lembaga Peradilan Tertinggi</p>

		tersebut.
3	<p>Hatta yang juga menjabat sebagai Ketua Muda Pengawasan MA <u>tersebut</u> menyayangkan praktik tercela oleh oknum hakim tersebut. Kasus suap <u>tersebut</u> mencoreng citra dunia peradilan, khususnya MA sebagai lembaga peradilan tertinggi. <u>Tambahan lagi</u>, lanjut dia, kasus tersebut terjadi saat MA tengah melakukan pembenahan birokrasi lembaga peradilan.</p>	<p>Terjadi pemborosan kata pada kata <u>tersebut</u>, sebaiknya dihilangkan saja. Selanjutnya kata <u>tersebut</u> sebaiknya diganti dengan kata <u>itu</u>, karena sudah mengalami pengulangan dari kalimat sebelumnya. <u>Tambahan lagi</u> merupakan kata transisi atau kata penat, tidak ada makna apapun, sebaiknya dihilangkan saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Hatta yang juga menjabat sebagai Ketua Muda Pengawasan MA menyayangkan praktik tercela oleh oknum hakim tersebut. Kasus suap <u>itu</u> mencoreng citra dunia peradilan, khususnya MA sebagai lembaga peradilan tertinggi. Kasus tersebut terjadi saat MA tengah melakukan pembenahan birokrasi lembaga peradilan.</p>

4	Dalam pertemuan tersebut, ketua pengadilan biasanya juga mengingatkan para hakim <u>untuk tetap lurus dalam menjaga wibawa hakim.</u>	<p>Kalimat <u>untuk tetap lurus dalam menjaga wibawa hakim</u> banyak menggunakan kata-kata abstrak yang sulit dipahami. Dsini terlihat si wartawan menulis berita langsung dari kerangka berfikir narasumber. Kata absrak ini seharusnya di ikuti dengan kalimat konkritnya. Sperti “ adil dalam bertindak dan tidak menerima suap dalam bentuk apapun.”</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Dalam pertemuan tersebut, ketua pengadilan biasanya juga mengingatkan para hakim <u>untuk tetap lurus dalam menjaga wibawa hakim. Seperti: adil dalam bertindak dan tidak menerima suap dalam bentuk apapun.</u></p>
5	Namun, dia berharap, <u>dengan adanya</u>	<u>Dengan adanya kasus tersebut</u> tidak perlu lagi dijelaskan, karena

	<p><u><i>kasus tersebut,</i></u> masyarakat tidak lantas <u><i>memukul rata</i></u> bahwa semua hakim buruk. <u><i>Jangan dipukul rata.</i></u> “jumlah hakim di Indonesia ini ada sekitar 7000, tapi yang tercela Cuma satu, dua saja,” tambah dia.</p>	<p>sudah paparkan pada paragraf sebelumnya. Dalam hal ini kata memukul rata tidak tepat digunakan, sebaiknya diganti padanannya dengan <u><i>menganggap.</i></u></p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Namun, dia berharap, masyarakat tidak lantas <u><i>menganggap</i></u> bahwa semua hakim buruk. “jumlah hakim di Indonesia ini ada sekitar 7000, tapi yang tercela Cuma satu, dua saja,” tambah dia.</p>
7	<p><u><i>Sementara itu,</i></u> KPK juga masih menelusuri kasus suap yang <u><i>juga</i></u> melibatkan kurator PT SCI Puguh Wirawan.</p>	<p>Kata <u><i>sementara itu</i></u> merupakan kata transisi atau kata penat, tidak mengandung makna apapun, sebaiknya dihilangkan saja. Selanjutnya kata <u><i>juga</i></u> telah terjadi pengulangan kata. Sebaiknya dipenggal saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>KPK juga masih menelusuri kasus suap yang melibatkan kurator</p>

		PT SCI Puguh Wirawan.
9	<p>Paragraf sembilan</p> <p>Pimpinan KPK Bidang Pencegahan <u>tersebut menegaskan</u>, saat penangkapan terdapat barang bukti berupa uang yang diduga hasil penyuapan sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut tersimpan di tiga buah amplop yang diletakkan dalam tas kertas. selain <u>duit tersebut</u>, juga ditemukan <u>uang dengan</u> berbagai mata uang asing di luar uang suap tersebut.</p>	<p>Kata <u>tersebut</u> lebih tepat diganti dengan kata itu, karena menunjukkan kata orang, kata menegaskan tidak tepat digunakan untuk hal yang tidak kontroversi dan diperdebatkan, sebaiknya diganti kata mengatakan. Lalu kata <u>duit tersebut</u> sebaiknya dirampingkan dengan kata itu. <u>Uang dengan</u> dihilangkan saja, karena terjadi pengulangan pada kalimat berikutnya.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Pimpinan KPK Bidang Pencegahan <u>itu mengatakan</u>, saat penangkapan terdapat barang bukti berupa uang yang diduga hasil penyuapan sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut tersimpan di tiga buah amplop yang diletakkan dalam tas kertas. selain <u>itu</u>, juga ditemukan</p>

		berbagai mata uang asing di luar uang suap tersebut.
10	<p><u>Ketika ditanya perihal pemeriksaan lanjutan dua tersangka kasus suap tersebut,</u></p> <p>Haryono menyatakan pemeriksaan akan dilakukan pekan depan.</p>	<p><u>Ketika ditanya perihal pemeriksaan lanjutan dua tersangka kasus suap tersebut,</u> Kalimat ini banyak menggunakan kata tidak lugas.</p> <p>Tidak perlu lagi menulis waktu wartawan bertanya pada narasumber.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p><u>Soal pemeriksaan lanjutan,</u> Haryono menyatakan pemeriksaan akan dilakukan pekan depan.</p>
12	<p><u>Seperti diketahui</u> KPK menangkap Syarifuddin di kediamannya di Kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Rabu malam (1/6).</p>	<p><u>Seperti diketahui</u> merupakan kata transisi atau kata penat, tidak mempunyai makna apapun, sebaiknya dihilangkan saja.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>KPK menangkap Syarifuddin di kediamannya di Kawasan</p>

		Sunter, Jakarta Utara pada Rabu malam (1/6).
--	--	---

Tabel VI

Riau Pos Rdisi 6 Juni 2011

Judul: GubsuSyamsul Arifin Kritis

Paragraf	Berita	Analisis
2	<p>Tim dokter terus memantau perkembangan syamsul. Informasi yang berkembang semalam, jika kondisi syamsul tak membaik, <u>ada kemungkinan</u> pihak keluarga akan membawanya ke RS di Singapura. <u>Lantaran</u> kondisinya kritis, dalam dua hari terakhir ini tak ada pembesuk yang diperkenankan masuk. Hanya keluarga dekat, seperti istri, anak dan menantu yang juga dokter jantung, <u>yang</u></p>	<p>Penggunaan kata non baku <u>lantaran</u>, sebaiknya diganti dengan kata <u>karena</u>. dan pemborosan kata <u>ada kemungkinan</u>, <u>yang</u> sebaiknya dihilangkan saja.</p> <p>Seperti:</p> <p>Tim dokter terus memantau perkembangan syamsul. Informasi yang berkembang semalam, jika kondisi syamsul tak membaik, pihak keluarga akan membawanya ke RS di Singapura. <u>karena</u> kondisinya kritis, dalam dua hari terakhir ini tak ada pembesuk yang diperkenankan masuk. Hanya keluarga dekat, seperti istri, anak dan</p>

	dibolehkan ada di ruang perawatan khusus pasien gawat itu.	menantu yang juga dokter jantung, dibolehkan ada di ruang perawatan khusus pasien gawat itu.
4	<u>Keduanya pada Gatot</u> menjelaskan kondisi Syamsul yang belum boleh dibesuk siapapun. “Dari sisi kesehatan belum bisa dibesuk, begitu pesan dokter,” terang Rosmen. .	Bisa dipendekkan menjadi, <u>mereka mengatakan</u> . Agar kalimat yang disampaikan menjadi lugas <i>Seperti:</i> <u>Mereka</u> menjelaskan kondisi Syamsul yang belum boleh dibesuk siapapun. “Dari sisi kesehatan belum bisa dibesuk, begitu pesan dokter,” terang Rosmen. Paragraf Delapan
9	<u>Ditanya mengapa baru membesuk Syamsul setelah Sembilan hari di RS,</u> Gatot mengatakan dia sangat sibuk dengan urusan	Sebaiknya langsung saja ditulis <u>Gatot membesuk syamsul setelah Sembilan hari.</u> <i>Seperti:</i>

	<p>dinas. Antara lain hadir di acara yang dihadiri presiden di Pontianak, presentasi disidang kabinet, ada acara promosi wisata, dan sebagainya.</p>	<p><u>Gatot membesuk syamsul setelah Sembilan hari.</u> Gatot mengatakan dia sangat sibuk dengan urusan dinas. Antara lain hadir di acara yang dihadiri presiden di Pontianak, presentasi disidang kabinet, ada acara promosi wisata, dan sebagainya.</p>
--	--	--

Tabel VII

Riau Pos Edisi 22 Juni 2011

Judul : Rp 2,4 M Dana Bansos Dikorup

Paragraf	Berita	Analisis
2	<p>Anggaran Bansos adalah transfer uang atau barang yang diberi ke masyarakat <u><i>guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap dirinya.</i></u></p>	<p>Terdapat banyak kata abstrak dalam kalimat diatas, sebaiknya kata itu diikuti dengan kata konkrit seperti “ seperti bantuan masyarakat miskin dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.”</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Anggaran Bansos adalah transfer uang atau barang yang diberi ke masyarakat <u><i>guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap dirinya,</i></u> seperti bantuan masyarakat miskin dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.</p>

6	<p>Penyimpangan <u>nomor</u> dua terbesar ditemukan di Kementerian Pemuda Dan Olahraga yang di <u>nakhodai</u> Andi Mallarangeng.</p> <p>Sebaiknya kata <u>nomor</u> diganti saja dengan imbuhan <u>ke</u>, lalu dinakhodai tidak tepat digunakan untuk lembaga formal, sebaiknya diganti padanan katanya dengan di <u>pimpin</u>.</p>	<p>Sebaiknya kata <u>nomor</u> diganti saja dengan imbuhan <u>ke</u>, lalu dinakhodai tidak tepat digunakan untuk lembaga formal, sebaiknya diganti padanan katanya dengan di <u>pimpin</u>.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Penyimpangan <u>kedua</u> terbesar ditemukan di Kementerian Pemuda Dan Olahraga yang di <u>pimpin</u> Andi Mallarangeng.</p>
12	<p>Tujuannya lebih sebagai pencegahan agar dana Bansos <u>tak menjadi jebakan bagi politisi dan penguasa lokal.</u></p>	<p>Terdapat kata abstrak pada kalimat diatas, sebaiknya dirubah menjadi kalimat konkrit seperti ”tidak menjadi disalahgunakan untuk dana kampanye bagi politisi lokal.”</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Tujuannya lebih sebagai pencegahan agar dana Bansos <u>tak</u></p>

		<p><u>menjadi jebakan bagi politisi dan penguasa lokal.</u> Seperti disalah gunakan untuk dana kampanye .</p>
--	--	---

Tabel VIII

Riau Pos Edisi 24 Juni 2011

Judul : Pensiun Dini, PNS Dapat Kompensasi

Paragraf	Berita	Analisis
1	Pemerintah mulai menyiapkan aturan yang <u>akan</u> menjadi payung hukum pensiun dini PNS, termasuk bentuk-bentuk kompensasinya.	Kata <u>akan</u> sebaiknya dihilangkan saja, karena kalimat sebelumnya sudah menerangkan makna. <i>Seperti:</i> Pemerintah mulai menyiapkan aturan yang menjadi payung hukum pensiun dini PNS, termasuk bentuk-bentuk kompensasinya.
6	Rencana <u>untuk</u> melakukan pensiun dini di kalangan PNS, menurut Any, sebagai upaya	Kata <u>untuk</u> sebaiknya dihilangkan saja, karena tidak mempengaruhi makna.

	mengurangi beban Negara	<p><i>Seperti:</i></p> <p>Rencana melakukan pensiun dini di kalangan PNS, menurut Any, sebagai upaya mengurangi beban Negara</p>
--	-------------------------	---

Tabel XI

Riau Pos Edisi 25 Juni 2011

Pekanbaru Coblos Ulang

Paragraf	Berita	Analisis
10	<p><u>Sementara itu lanjut Anwar</u>, terhadap dalih pihak terkait (PAS) yang menyatakan pemohon (Berseri) juga melakukan pelanggaran yang sama, yaitu keterlibatan Gubernur Riau dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 2, mobilisasi PNS dan <i>money politic</i> (politik uang). Mahkamah tak menemukan bukti <u>yang</u> meyakinkan adanya mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif, yang</p>	<p><u>Sementara itu</u> merupakan kata transisi atau kata penat yang tidak memiliki makna apapun, sebaiknya dihilangkan saja. Terlalu banyak pengulangan kata <u>yang</u> dan penggunaan kata non baku tak. Pemborosan kata terdapat pada kata <u>tapi</u> dan imbuhan <u>lah</u>, begitu juga dengan kata <u>seperti diketahui</u>, sebaiknya dihilangkan saja, karena ia merupakan kata penat yang tidak memiliki makna. Kata <u>coblos</u> diganti dengan kata <u>Pilkada</u> agar lebih spesifik.</p> <p><i>Seperti:</i></p> <p>Anwar mengatakan, terhadap dalih pihak terkait (PAS) yang</p>

<p>dilakukan pemohon atau timnya <u>yang</u> melibatkan pejabat dan PNS di Kota Pekanbaru. “Memang ada beberapa kepala dinas, kepala desa, RT, RW yang mendukung pemohon. <u>Tapi</u> hal itu tidak <u>lah</u> serta merta merupakan mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif,” ulasnya. <u>Seperti diketahui</u>, putusan MK agar dilakukan <u>coblos</u> ulang di Pemilukada Kota Pekanbaru ini adalah kali pertama dalam sengketa Pemilukada Kabaten/Kota di Riau. Sebelumnya, kabupaten Rohul, Bengkalis, Kuansing, Rohil, Siak dan Kota Dumai juga sempat berperkara di MK.</p>	<p>menyatakan pemohon (Berseri) juga melakukan pelanggaran yang sama, yaitu keterlibatan Gubernur Riau dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 2, mobilisasi PNS dan <i>money politic</i> (politik uang). Mahkamah tak menemukan bukti meyakinkan adanya mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan pemohon atau timnya melibatkan pejabat dan PNS di Kota Pekanbaru. “Memang ada beberapa kepala dinas, kepala desa, RT, RW yang mendukung pemohon. Hal itu tidak serta merta merupakan mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif,” ulasnya. Putusan MK agar dilakukan <u>Pilkada</u> ulang di Pemilukada Kota Pekanbaru ini adalah kali pertama dalam sengketa Pemilukada Kabaten/Kota di Riau. Sebelumnya, kabupaten Rohul, Bengkalis, Kuansing, Rohil, Siak dan Kota Dumai juga sempat berperkara di</p>
--	--

		<p> MK. </p>
12	<p> Menurutnya, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan, <u>dalam hal ini</u> KPU sebagai pihak penyelenggara. </p>	<p> Kata <u>dalam hal</u> ini sebaiknya dihilangkan saja agar tidak terlalu panjang. </p> <p> <i>Seperti:</i> </p> <p> Menurutnya, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan KPU sebagai pihak penyelenggara. </p>
13	<p> Meski demikian, <u>yang perlu diketahui</u> dalam putusan MK itu tak terdapat kesalahan dari KPU. Tapi lebih mengarah ke pihak terkait (pasanganPAS) yang menyebabkan Pemilikada ulang. </p>	<p> Kata <u>yang perlu diketahui</u> sebaiknya dihilangkan saja. Ini merupakan kata penat yang membuat tulisan semakin gemuk. </p> <p> <i>Seperti:</i> </p> <p> Meski demikian, dalam putusan MK itu tak terdapat kesalahan dari KPU. Tapi lebih mengarah ke pihak terkait (pasanganPAS) yang menyebabkan Pemilikada ulang. </p>

--	--	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Terpaan media internet membawa dampak besar bagi perkembangan informasi. Walhasil, Surat kabar, televisi dan radio tidak lagi mengandalkan medianya sendiri, tetapi sudah memakai media internet. Perkembangan teknologi membuat masyarakat tidak perlu lagi meluangkan waktu hanya untuk sekedar membaca koran. Sebut saja *computer tablet*, *smart phone* melalui *i-pad* dan *blackberry*, dan teknologi multimedia lainnya yang super canggih membuat orang bisa akses informasi kapan saja dan dimana saja.

Melihat kemajuan dan perkembangan media informasi dari masa ke masa. Tentu membuat para pegiat *Media Mainstream* bekerja ekstra keras mengatur strategi demi eksistensi lembaganya. Sejatinya yang menjadi daya pikat masyarakat terhadap media cetak sebenarnya terletak pada penyajian berita yang proporsional dan konfrehensif. Hal ini sesuai dengan standar profesional jurnalis yakni Sembilan elemen jurnalisme versi Bill Kovack dan Tom Rosenthil, ia Kurator *Nieman Fellowship on Journalism* dari Universitas Harvard.

Tidak kalah penting elemen ke tujuh: wartawan harus membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Dalam hal ini wartawan bertugas menemukan cara membuat hal-hal yang penting menjadi menarik untuk setiap

cerita. Membuat tulisan lebih bermakna, relevan dan enak di simak (Kovack 2006:44).

Dua standar jurnanisme di atas menuntun para jurnalis memikat minat baca masyarakat melalui tulisan. Tentu tidak terlepas dari kalimat dan bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Kekuatan media cetak dibanding media lain berada pada tulisan, media cetak bisa menyajikan informasi sebanyak dan sedalam mungkin, terlebih melalui kata-kata dan bahasa yang memikat membuat pembaca ikut merasakan apa yang sebenarnya terjadi (Harsono 2010:13).

Untuk lebih mudah memahami penggunaan bahasa jurnalistik yang baik, dalam penyajian berita seorang wartawan diuntut untuk menguasai kaidah bahasa jurnalistik itu sendiri. Seorang wartawan mesti memahami norma-norma bahasa Indonesia sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Di Sempurnakan) (Sumaditirna 2005:25).

Menurut Robin dan Jones, penguasaan bahasa tulis atau bahasa jurnalistik merupakan modal pokok bagi seorang jurnalis. Bahasa tulisan akan lebih formal dalam bahasa lisan atau dalam bahasa tulisan, struktur, kalimat, ketaatan pada kaidah bahasa. Misalnya kalimat harus lengkap Subjek, Predikat, Objek dan Keterangan (SPOK) merupakan keharusan (Asep 1999:41)

Bagi para jurnalis, bahasa adalah senjata, dan kata-kata adalah pelurunya. Mereka tidak mungkin bisa mempengaruhi suasana hati dan gejolak perasaan pembaca jika tidak menguasai bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Itulah sebabnya, para jurnalis harus di bekali amunisi berupa penguasaan yang memadai

atas kosa kata, pilihan kata, kalimat, paragraph, gaya bahasa dan etika jurnalistik (Sumadiria 2008:31).

Bahasa jurnalistik harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti tampil menarik, variatif, segar, berkarakter. Selain itu, ia juga harus senantiasa tampil ringkas dan lugas, logis, dinamis, demokratis, dan populis. Dalam bahasa jurnalistik, setiap kata harus bermakna, bahkan harus bertenaga, dan bercita rasa. Kata bertenaga dengan cepat dapat membangkitkan daya motivasi, persuasi, fantasi, dan daya imajinasi pada benak khalayak (Sumadiria2008:33).

Pendayagunaan kata pada dasarnya berkisar pada dua persoalan pokok. *Pertama*, ketepatan memilih kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan, hal, atau barang yang akan diamanatkan. Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara.

Ketepatan memilih kata dapat dicapai apabila kita sebagai penulis atau jurnalis menguasai dengan baik masalah etimologi, semantik, tata bahasa, ejaan, frasa, klausa, istilah, ungkapan, idiom, jargon, singkatan, akronim, peribahasa, kamus, dan ensiklopedia.

Kedua, kesesuaian atau kecocokan dalam menggunakan kata tadi. Hal ini lebih banyak dipengaruhi faktor teknis tata bahasa, faktor psikologis narasumber dan jurnalis, konteks situasi dan maksud pesan yang disampaikan, serta aspek-aspek etis, etnis, dan sosiologis khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Dalam jurnalistik ada istilah Diksi yang berarti pilihan kata. Seorang jurnalis harus pandai memilih kata untuk memberi tekanan makna pada pesan yang ingin disampaikan. Kepiawaian memilih kata bukan karena penguasaan kosa kata atau perbendaharaan kata yang sangat banyak dan variatif, melainkan juga karena ia memang terbiasa menulis. Sebagai proses kreatif, keterampilan menulis hanya mungkin dicapai melalui proses berlatih yang terus menerus, tidak sekali jadi (Sumadiria 2008:40).

Pilihan kata atau diksi yang tidak tepat dalam setiap kata jurnalistik, bisa menimbulkan akibat fatal. Seperti ditegaskan pakar bahasa terkemuka, pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh jalinan kata itu. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan.

Fraseologi mencakup persoalan kata-kata dalam perkelompokan atau susunannya, atau yang menyangkut cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan-ungkapan. Gaya bahasa sebagai bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi (Keraf, 2004:22-23).

Menurut pakar bahasa dari Universitas Indonesia, Gorys Keraf. Pilihan kata tidak hanya mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi juga mempersoalkan apakah kata yang dipilih itu dapat juga diterima atau tidak merusak suasana yang ada. Sebuah kata yang tepat untuk menyatakan suatu

maksud tertentu, belum tentu dapat diterima oleh hadirin atau orang yang diajak bicara (Sumadiria 2008:35).

Memilih kata (Diksi) juga perlu mempertimbangkan nalar. Kata yang mengakibatkan multi tafsir sebaiknya dihindarkan. Contoh judul berita olahraga yang dimuat Surat kabar Riau Pos edisi Senin 20 Desember 2010. Di tulis judul seperti berikut “Perang Ke-2 Indonesia-Malaysia”. Riau Pos memuat berita soal pertandingan Final piala AFF yang mempertemukan Indonesia-Malaysia.

Judul seperti ini seharusnya bukan menjadi tempatnya untuk ditulis atau diungkapkan. Kata-kata tersebut memang merupakan suatu hal yang membuat ketertarikan sendiri bagi suatu media massa agar memiliki nilai komersil dan daya tarik bagi pembaca dan pendengar berita. Namun, alangkah baiknya apabila kata “perang” kita gantikan dengan kata-kata yang lebih baik lagi dan memiliki nilai rasa, seperti “Laga Ke-2 Indonesia-Malaysia” atau “Indonesia Jumpa Malaysia di Final”. Judul seperti ini terkesan lebih baik dan lebih bermakna dalam dunia olahraga. Kebiasaan menulis judul yang terkesan profokatif ini hendaknya jadi perhatian besar bagi para jurnalis olahraga.

Sebab olahraga mengedepankan unsur sportifitas, *fairplay*, dan nilai-nilai etika lain yang mendasari suatu bidang olahraga tersebut dapat berjalan secara harmonis dan sesuai dengan aturan yang ada.

Dampak lain, kata-kata tersebut terkesan profokatif dan menimbulkan multitafsir bagi pembaca. Dalam hal ini wartawan hendaknya memperhatikan kode etik jurnalistik. Etika dalam memakai kata-kata yang dinilai kurang benar kerap kali diabaikan yang akhirnya memicu perselisihan yang ada.

Misalnya antara suporter kedua belah pihak. Dengan adanya kata-kata seperti itu, membuat suporter dari kedua belah pihak menjadi terpancing emosinya dan menimbulkan adanya konflik yang lebih buruk dari sebelumnya, berawal hanya saling mencemooh dan mencela hingga adanya kekerasan yang berlanjut.

Hati-hati menggunakan kata untuk memaknai atau menegaskan ucapan sumber berita. Pemakaian kata yang tidak tepat sering kali menimbulkan distorsi pesan. Kata *mengatakan* punya padanan *mengungkapkan*, *menjawab*, *membenarkan*, *menyangkal* dan sebagainya. Pemilihan kata yang tepat untuk digunakan menyampaikan pesan amatlah penting. Bukan hanya untuk memfokuskan makna, melainkan juga mengindikasikan keberpihakan atau empati si wartawan serta media massanya. Kadang, si wartawan mengikuti kerangka berfikir sumber berita sehingga menguntungkan sumber berita (Dewabrata 2010:56).

Masing-masing kata memiliki nuansa makna yang berbeda. Dari situlah kita merasakan perbedaan nuansa atau suasana yang melekat atau terkandung pada sebuah kata. Dengan cara membedakan itulah kita memilih kata untuk menyusun kalimat yang tepat sebagai alat menyampaikan pesan kepada komunikan, pembaca atau pendengar. Memilih kata amat penting dalam penulisan berita. (Dewabrata 2010:57).

Dari latar belakang diatas, memberi gambaran jelas tentang arti pentingnya pemilihan kata atau diksi dalam bahasa jurnalistik. Kesalahan memilih kata berdampak kepada makna, maksud dan tujuan dari informasi yang disajikan. Semakin baik kata yang digunakan semakin baik juga bahasa dalam jurnalistik,

semakin jelas juga informasi yang diperoleh pembaca. Sebaliknya, semakin buruk diksi dalam bahasa, semakin kabur pula informasi yang diterima pembaca.

Surat Kabar Riau Pos merupakan media terbesar di Riau bahkan Sumatra. Terbit setiap hari dengan oplah 40.000 eksemplar. Dibaca lebih dari 500.000 masyarakat Riau. Sekarang Surat Kabar Riau Pos menempati posisi *market leader* yang tersebar di sebelas kabupaten / kota di Propinsi Riau. (Nazir Fahmi, Wapemred Riau Pos). Membuat penulis tertarik meneliti media tersebut, mengingat pentingnya penggunaan bahasa dalam menulis berita guna menarik minat baca masyarakat.

Menilik persoalan itu, maka penulis tertarik untuk meneliti Surat Kabar Riau Pos dalam menerapkan Diksi dalam bahasa jurnalistik pada berita *headline* Edisi 1 Juni-30 Juni 2011 dengan judul **“ANALISIS ISI PENERAPAN DIKSI DALAM BAHASA JURNALISTIK PADA *HEADLINE* SURAT KABAR RIAU POS”**

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Penulis ingin mengetahui apakah dalam menulis berita *headline* Surat Kabar Riau Pos sudah menerapkan Diksi atau pilihan kata yang baik dan benar dalam bahasa jurnalistik.
2. Diksi atau pilihan kata dalam bahasa jurnalistik sangat menarik diteliti untuk mengukur kompetensi dan profesionalitas wartawan dalam menulis berita.
3. Penulis melihat judul ini belum pernah diangkat sebelumnya.
4. Judul yang dipilih sesuai dengan bidang ilmu jurnalistik yang penulis tekuni.

5. Penulis melihat penyajian berita dengan mempertimbangkan Diksi atau pilihan kata bisa menilai kualitas dan *accountabilitas* dari media cetak itu sendiri sehingga sangat menarik untuk di teliti.

C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah. Bagaimana penerapan diksi atau pilihan kata dalam bahasa jurnalistik pada berita *Headline* Surat Kabar Riau Pos?

D. Batasan Masalah

Agar mempermudah arah penelitian, penulis membuat batasan masalah. Karya ilmiah ini dibatasi pada berita hukum dan politik di *Headline* Surat Kabar Riau Pos Edisi 1-30 Juni 2011. Berita *headline* edisi Juni 2011 sangat menarik untuk diteliti karena kecenderungan kasus hukum dan politik pada bulan Juni 2011 menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan Diksi Surat Kabar Riau Pos dalam menyajikan berita pada berita *headline* edisi 1-30 Juni 2011.

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Penjelasan kepada masyarakat pada umumnya, juga kepada penulis khususnya untuk menambah wawasan bagi penulis dalam bidang kajian jurnalistik.

2. Sebagai sumbangsih pikiran kepada penggiat jurnalistik dan praktisi pers.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada mahasiswa ilmu komunikasi.
4. Sebagai syarat menyelesaikan program Studi Strata 1 (S-1) Jurusan Ilmu Komunikasi.
5. melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan terhadap judul karya ilmiah ini, maka penulis memberikan beberapa penegasan istilah yang terdapat pada judul tersebut, sebagai berikut:

1. Analisis Isi

Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang ditampilkan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: Surat kabar, buku, Puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, photo, surat, peraturan, undang-undang, music, teater, dan sebagainya (Rakhmat 2007:92).

2. Penerapan Diksi

Penerapan diartikan sebagai suatu hal, cara, atau hasil kerja (Badudu, Zein 1994:1487). Berarti suatu langkah atau cara kerja wartawan dalam melakukan pemilihan kata atau Diksi pada bahasa jurnalistik saat menulis berita. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat makna dalam bahasa jurnalistik pada penulisan berita, tujuannya agar berita yang disajikan tepat

dan akurat sesuai dengan tujuan pesan pokok yang ingin disampaikan kepada khalayak (Sumadiria 2008:40).

3. Bahasa Jurnalistik

Terdapat dua kata dalam penafsiran bahasa jurnalistik, yakni “bahasa” dan “jurnalistik”. Arti kata bahasa dapat dipahami sebagai alat untuk menyatakan pikiran, perasaan dan pengalaman seorang kepada orang lain baik lisan maupun tulisan. Kata jurnalistik artinya kegiatan menyampaikan peristiwa (informasi) kepada masyarakat melalui media massa. Dengan kata lain bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan, sering juga disebut bahasa pers atau bahasa Koran yang berisifat singkat, padat, sederhana, lancar, kelas, lugas dan menarik (Sumadiria 2008:12).

4. *Headline*

Headline memiliki pengertian sebagai berita yang menjadi laporan utama, yang letaknya dihalaman paling depan, dan judul berita biasanya dicetak paling besar dari pada kerangka ceritanya yang nantinya menentukan minat khalayak untuk membaca atau tidak. (Rolnicki,2008:223).

5. Riau Pos

Merupakan sebuah media massa jenis cetak yang terbit harian, daerah sirkulasi tersebar di sebelas kabupaten/kota Provinsi Riau. Riau Pos termasuk dalam kelompok penerbitan Jawa Pos Grup, beralamat di jalan HR Soebrantas (Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang) KM 10,5 Pekanbaru.

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

A. Kerangka Teoritis

1. Diksi

Kita mengenal kata *dictionary* (Inggris) yang umumnya diterjemahkan menjadi *kamus*. Padahal, kata dasarnya, *diction* adalah perihal pemilihan kata. Lalu dalam bahasa Indonesia kita diperkenalkan kata *diksi* dari bahasa Inggris, *Diction* yang sebenarnya dimaknai sebagai ‘cara mengucap kata-kata’ (Wojowasito, *kamus lengkap*, halaman 42). Jadi, Diksi itu soal penggunaan kata, terutama pada soal kebenaran, kejelasan, atau keaktifan (Sumadiria2008:40).

Seorang jurnalis harus pandai memilih kata untuk memberi tekanan makna pada pesan yang ingin disampaikannya. Kepiawaian memilih kata bukan karena penguasaan kosa kata atau perbendaharaan kata yang sangat banyak dan variatif, melainkan juga karena ia memang terbiasa menulis. Sebagai proses kreatif, keterampilan menulis hanya mungkin dicapai melalui proses berlatih yang terus menerus, tidak sekali jadi.

Pilihan kata atau diksi yang tidak tepat dalam setiap kata jurnalistik, bisa menimbulkan akibat fatal. Seperti ditegaskan pakar bahasa terkemuka, pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh jalinan kata itu. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu idea atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan (Sumadiria:44)

Fraseologi mencakup persoalan kata-kata dalam perkelompokan atau susunannya, atau yang menyangkut cara-cara yang khusus berbentuk ungkapan-

ungkapan. Gaya bahasa sebagai bagian dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang tinggi (Keraf, 2004:22-23).

Pilihan kata atau diksi harus pula senantiasa mempertimbangkan dimensi psikologis dan dimensi sosiologis suatu masyarakat. Diksi tidak bisa digunakan hanya dengan merujuk kepada faktor-faktor teknis tata bahasa. Gorys Keraf menyimpulkan terdapat tiga hal yang berkaitan dengan diksi.

Pertama, Pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi.

Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pembaca.

Ketiga, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud kosa kata atau perbendaharaan kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa (Keraf, 2004:24).

Dalam bahasa jurnalistik, diksi kerap bersinggungan dengan masalah pemakaian: kata-kata bersinonim, kata-kata bernilai rasa, kata-kata konkrit, kata-kata abstrak, kata-kata umum, kata-kata khusus dan kata lugas. Sebagian jurnalis

kita seperti tidak menyadari kalau bahasa jurnalistik yang mereka gunakan dalam penulisan sudah keluar dari koridor yang telah ditentukan.

1. Kata Bersinonim

Kata bersinonim berarti kata yang sejenis, sepadan, sejajar, serumpun dan memiliki arti yang sama. Meskipun demikian, seperti diingatkan oleh pakar bahasa, kata bersinonim ada yang dapat saling menggantikan dan ada yang tidak. Ada pula kata-kata bersinonim yang pemakaiannya dibatasi oleh persandingan yang dilazimkan. Karena itu, kita harus memilihnya secara cermat (Soedjito, 1988:3).

Diksi menghendaki setiap kata dalam bahasa jurnalistik menjadi hidup, segar, khas, dan menunjukkan pesan sesungguhnya seperti yang dikehendaki sipenutur atau narasumber. Setiap kata tidak saja bicara tentang bentuk dan isi, tetapi juga menyangkut masalah konteks.

2. Kata Bernilai Rasa

Kata-kata bernilai rasa tinggi akan memiliki dampak yang lebih kuat dibenak khalayak dibanding kata bernilai rasa rendah. Secara psikologis misalnya, kata bernilai rasa tinggi menunjukkan penghormatan kepada subjek yang sedang dibicarakan.

3. Kata konkrit

Kata-kata yang menunjukkan kepada objek yang dapat dipilih, didengar, dirasakan, diraba, atau dicium. Kata-kata konkrit lebih mudah dipahami dari pada kata-kata abstrak. Kata-kata konkrit dapat lebih efektif dalam

narasi atau deskripsi sebab dapat merangsang panca indra (Soedjito, 1988:5).

4. Kata Abstrak

Kata-kata yang menunjukkan suatu sifat, konsep atau gagasan. Kata-kata abstrak sering dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang rumit (Soedjito, 1988:5). Kata-kata abstrak sukar dipahami maksud dan maknanya. Bahasa jurnalistik tidak menyukai kata-kata abstrak karena pasti hanya akan menyulitkan dan membingungkan khalayak pembaca.

5. Kata Umum

Kata-kata yang luas ruang lingkupnya, makin umum makin kabur gambarannya dalam angan-angan (Soedjito, 1985:5). Kata-kata umum sesungguhnya bertentangan dengan prinsip akurasi dalam etika dasar jurnalistik. Akurasi berarti ketelitian dan ketepatan secara spesifik. Sesuatu yang khas sekaligus membedakan dirinya dari yang lain. Kata-kata umum bisa mengaburkan pesan dan menyesatkan pemahaman.

6. Kata khusus

Kata-kata yang sempit ruang lingkupnya. Makin khusus, makin jelas maksud dan maknya. Kata-kata khusus lebih menegaskan pesan, memusatkan perhatian dan pengertian, serta sangat selaras dengan prinsip akurasi dalam etika dasar jurnalistik. Kata-kata khusus sangat dianjurkan untuk lebih banyak dipilih dan digunakan dalam peliputan, penulisan dan pelaporan jurnalistik.

7. Kata Lugas

Kata-kata yang bersifat tembak langsung (*to the point*) tegas, lurus, apa adanya, kata-kata yang bersahaja. Kata yang lugas adalah kata yang sekaligus juga ringkas, tidak merupakan frase yang panjang, tidak mendayu-dayu. Bahasa jurnalistik didisain untuk khalayak pembaca, yang sibuk, bergegas (*mobile*) berpacu dengan waktu tetapi haus dengan informasi. Mereka menghendaki segala hal yang instan, serba siap saji.

2. Bahasa Jurnalistik

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *journal*. Dalam bahasa perancis *journal* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari (Sumadiria, 2005:2) dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit dan menulis untuk surat kabar, majalah atau berkala lainnya (Assegaf, 1983:3). Dalam *leksikon komunikasi* dirumuskan, jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah dan media massa lainnya seperti radio dan televisi (Kridalaksana, 1977:44).

Seorang jurnalis harus terampil berbahasa. Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu keterampilan menyimak (*listening skill*), keterampilan berbicara (*Speaking skills*), keterampilan membaca (*reading skills*), dan keterampilan menulis (*writing skills*). Setiap keterampilan berhubungan erat dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam (Sumadiria 2008:17).

Lebih jauh, setiap keterampilan tersebut berhubungan erat pula dengan proses-proses yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan fikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan fikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dengan cara praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir (Tarigan, 1980:1 Dawson, 1963:27).

Dalam pemahaman wartawan senior terkemuka Rosihan Anwar, bahasa yang digunakan oleh wartawan adalah bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa pers adalah salah satu ragam bahasa yang memiliki sifat khas yaitu : singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas dan menarik. Bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa baku. Dia tidak dapat menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa. Dia juga harus memperhatikan ejaan yang benar, dalam kosa kata, jurnalistik mengikuti perkembangan dalam masyarakat (Anwar, 1991:1).

Berikut rincian karakteristik bahasa jurnalistik

1. Sederhana

Sederhana berarti selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat heterogen, baik dilihat dari tingkat inteleguitasnya maupun karakteristik demografis dan psikografisnya. Kata-kata dan kalimat yang rumit, yang hanya dipahami oleh segelintir orang, tabu digunakan dalam bahasa jurnalistik.

2. Singkat

Singkat berarti langsung kepada pokok masalah (*to the point*), tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat berharga.

3. Padat

Tulisan yang disajikan sarat dengan informasi. Setiap kalimat yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca. Ini berarti terdapat perbedaan yang tegas antara kalimat singkat dan kalimat padat. Kalimat yang singkat tidak berarti memuat banyak informasi. Tetapi kalimat yang padat, kecuali singkat juga mengandung banyak informasi.

4. Lugas

Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Kata yang lugas selalu menekankan pada satu arti serta menghindari kemungkinan adanya penafsiran lain terhadap arti dan makna kata tersebut.

5. Jelas

Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Jelas susunan kata atau kalimatnya sesuai dengan kaidah subjek-Predikat-Objek-Keterangan (SPOK), jelas sasaran atau maksudnya.

6. Jernih

Jernih berarti bening, transparan, jujur dan tulus tidak menyembunyikan sesuatu yang lain bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah.

7. Menarik

Bahasa jurnalistik harus menarik. Mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu selera pembaca, serta membuat orang yang sedang tertidur, terjaga seketika. Bahasa jurnalistik berpijak pada prinsip: menarik, benar, dan jernih.

Menurut S. Wojowasito dari IKIP Malang dalam karya latihan wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (KLW PWI) di Jawa Timur (1978), bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harian-harian dan majalah-majalah. Dengan fungsi yang demikian itu bahasa tersebut haruslah jelas dan mudah di baca oleh mereka dengan ukuran entelek yang minimal, sehingga sebagian besar orang yang melek huruf dapat menikmati isinya. Walaupun demikian, bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai dengan norma-norma tata bahasa yang antara lain terdiri atas susunan kalimat yang benar dan pilihan kata yang cocok (Anwar, 1991:1-2).

3. *Headline*

Pada hakikatnya, *headline* merupakan intisari dari berita. Biasanya dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitahukan. *Headline* selain memiliki pengertian judul berita atau intisari berita, *headline* juga memiliki pengertian sebagai berita yang menjadi

laporan utama, yang letaknya dihalaman paling depan, dan judul berita biasanya dicetak paling besar dari pada kerangka ceritanya yang nantinya menentukan minat khalayak untuk membaca atau tidak. (Rolnicki,2008:223). Dalam penelitian ini *headline* yang dimaksud adalah berita politik di Surat Kabar Riau Pos edisi 1-30 Juni 2011.

Minimal khalayak tahu apa yang menjadi pokok pemberitaannya. Hal ini dilakukan biasanya karena bagi sebagian khalayak tidak memiliki banyak waktu untuk membaca keseluruhan isi berita, sehingga dengan membaca *headline* secara tidak langsung telah memperoleh informasi dari apa yang diberitakan itu.

4. *Readability Theory*

Readability Theory berupaya menguji tingkat keterbatasan isi media (misalnya berita surat kabar, artikel dan buletin) oleh pembacanya. Asumsinya jika berita-berita surat kabar tidak terbaca atau pembaca tidak mengerti kata-kata atau kalimat-kalimat dalam berita tersebut, maka lambat laun akan ditinggalkan pembacanya. Riset ini mulai muncul di Amerika. Bagi penulis pesan, uji *readability* ini berguna sebagai evaluasi untuk membuat tulisan yang lebih bisa dibaca dan dimengerti pembacannya. Mengacu dari artikel Media Watch (Oktober 1999), Severin & Tankard (2005), Cutlip & Center (2000), di bawah ini dijelaskan mengenai *Readability Studies*.

Readilbility mempunyai tiga dimensi dari proses pembaca, yaitu:

a. Pemahaman

Diartikan sebagai tingkat pengertian terhadap kata, frase, dan keterkaitan ide dalam bacaan dengan pengalaman dan pengetahuan pembaca.

b. Kelancaran

Bagaimana pembaca dapat membaca teks yang diberikan dalam kecepatan maksimal.

c. Ketertarikan

Diartikan sebagai faktor motivasi yang memengaruhi ketertarikan pembaca terhadap teks.

Mc Laughlin mendefinisikan *readability* sebagai derajat untuk menentukan pemahaman terhadap bacaan. Definisi ini menitik beratkan pada karakteristik pembaca dan derajat pemahaman teks. Pendapat ini memberikan argumen bahwa definisi *readability* harus didasarkan pada karakteristik pembaca karena pembaca diasumsikan akan terus membaca jika ia paham terhadap bacaan tersebut.

Studi *readability* menjadi penting karena dua hal. *Pertama*, studi ini dapat memberikan cara menilai keterbacaan suatu bacaan, sehingga kita dapat mengukur seberapa jauh bacaan itu dapat dimengerti oleh pembacanya. *Kedua*, studi *readability* dapat menyediakan informasi mengenai aspek terpenting dengan cara mudah dalam memahami suatu bacaan.

Teori dasar dari studi *readability* ini adalah tidak semua orang dapat dengan mudah memahami suatu bacaan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan kosa kata, rendahnya pendidikan atau kurangnya pengalaman. *Readability theory* merupakan dasar riset untuk mengetahui tingkat keterbacaan atau *readability level* dari suatu pesan tertulis.

Levely dan Pressey menjelaskan bahwa suatu bacaan akan sulit dipahami apabila dalam bacaan tersebut banyak kata yang susah dimengerti atau jarang

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Flesch memaparkan bahwa *readability* atau keterbacaan bertumpu pada asumsi dasar bahwa ada empat hal yang memengaruhi bacaan mudah dipahami, yaitu hubungan verbal, logika.

Wilson Taylor mengkaji *readability* sebagai aplikasi atau penerapan langsung dan praktis dari konsep *entropy* dan *redundancy* yang dikemukakan dalam teori informasi. *Redundancy* adalah konsep yang berkaitan dengan upaya mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan.

Taylor beranggapan sekalipun suatu pesan yang tersusun dari kalimat-kalimat dan kata-kata bermakna memiliki derajat *redundancy* yang tinggi, tetap tidak mudah bagi pembacanya untuk memahami pesan tersebut, apabila beberapa bagian darinya dihilangkan sehingga menimbulkan *entropy*. Frekuensi penghilangan kata tertentu dan jumlah kata berbeda yang disediakan untuk dihilangkan menunjukkan untuk kemampuan tulisan untuk diprediksi oleh pembaca.

B. Konsep Operasional

Agar mempermudah arah penelitian dalam melakukan pengamatan tentang Penerapan Diksi dalam bahasa jurnalistik, berdasarkan latar belakang kerangka teoritis diatas, maka penulis membuat konsep operasional sebagai tolak ukur dalam penulisan supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam melanjutkan kejenjang skripsi.

Pada riset media ini, analisis isi diartikan menganalisis isi pesan komunikasi secara objektif, terhadap pesan yang tampak. Sedangkan Diksi

merupakan pemilihan kata yang tepat makna dalam menyampaikan pesan pokok isi berita. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan dalam menulis berita.

Pada judul yang akan penulis teliti terdapat dua konsep “Diksi” dan “Bahasa Jurnalistik”. Untuk mengetahui penerapan Diksi dalam Bahasa Jurnalistik , penulis menguji dengan indikator:

Indikator Penerapan Diksi

1. Kata Bersinonim

Dalam jurnalistik, kata bersinonim berarti kata yang sejenis, sepadan, sejajar, serumpun dan memiliki arti yang sama. Tidak semua kata bersinonim dapat menggantikan makna yang sama dalam kalimat.

2. Kata Bernilai Rasa

Kata-kata bernilai rasa tinggi akan memiliki dampak yang lebih kuat dibenak khalayak disbanding kata bernilai rasa rendah. Secara psikologis misalnya, kata bernilai rasa tinggi menunjukkan penghormatan kepada subjek yang sedang dibicarakan.

3. Kata konkret

Kata-kata yang menunjukkan kepada objek yang dapat dipilih, didengar, dirasakan, diraba, atau dicium.kata –kata konkret lebih mudah dipahami dari pada kata-kata abstrak.

4. Kata Abstrak

Kata-kata yang menunjukkan suatu sifat, konsep atau gagasan. Kata-kata abstrak sering dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang rumit.

5. Kata Umum

Kata-kata yang luas ruang lingkupnya, makin umum makin kabur gambarannya dalam angan-angan.

6. Kata Khusus

Kata-kata yang sempit ruang lingkupnya. Makin khusus, makin jelas maksud dan maknanya.

7. Kata Lugas

Kata-kata yang bersifat tembak langsung (*to the point*) tegas, lurus, apa adanya, kata-kata yang bersahaja.

H. Metode Penelitian

Melihat permasalahan diatas maka penulis menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) untuk membantu penelitian. Analisa ini mencermati isi agar lebih benar, bermakna, lebih berarti atau lebih mudah untuk mengiringi interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain pendekatan ini guna mengetahui bagaimana penerapan diksi atau pilihan kata pada *Headline* Surat Kabar Riau Pos.

Metode analisis isi (*content analisist*) bisa memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis

semua bentuk komunikasi: Surat kabar, Buku, Puisi, Lagu, Cerita Rakyat, Lukisan, Pidato, Surat, Peraturan, Undang-Undang, Musik, Teater dan sebagainya (Rahmat, 2007:89).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian karya Ilmiah ini dilaksanakan di Surat Kabar Riau Pos, Jl. HR. Soebrantas / Panam Pekanbaru – Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Surat Kabar Riau Pos.
- b. Objek Pada penelitian ini adalah penerapan Diksi dalam bahasa jurnalistik pada berita *headline* di Surat Kabar Riau Pos edisi 1-30 Juni 2011

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi (universe) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. (Arikunto, 2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah Berita *Headline* Surat Kabar Riau Pos edisi 1-30 Juni 2011.
- b. Sampel adalah sebagian atau yang mewakili dari penelitian. Karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana maka sampel yang diambil adalah *headline* berita hukum dan politik Surat Kabar Riau Pos edisi 1-30 Juni 2011 sebanyak Sembilan berita yaitu: tanggal 1 Juni 2011, 2 Juni 2011, 3 Juni 2011, 4 Juni 2011, 5 Juni 2011, 6 Juni 2011, 22 Juni 2011, 24 Juni 2011, dan 25 Juni 2011.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang menjadi objek kajian karya ilmiah ini bersumber dari:

- A. Studi dokumentasi yaitu *Headline* Surat Kabar Riau Pos edisi 1-30 Juni 2011, dengan menghimpun dokumen-dokumen Surat Kabar Riau Pos yang berkaitan dengan penelitian sebagai data sekunder (data pendukung), guna melengkapi data-data yang akan penulis sajikan pada BAB II (Penyajian Data), yaitu gambaran umum Surat Kabar Riau Pos, sejarah berdirinya Riau Pos, Sistem Kerja, sarana dan prasarana dan struktur organisasi.
- B. *Interview* (wawancara), Penulis melakukan wawancara dengan Redaktur Bahasa Surat Kabar Riau Pos Harry B. Koriun untuk pendukung data sekunder pada penelitian karya ilmiah ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat. Penarikan kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto 1998:24)

Dalam penelitian ini penulis bermaksud menganalisis makna dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial. Penulis menggunakan metode analisis teks dan bahasa yaitu analisis isi (*countent analysis*) dalam penelitian

kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca symbol-simbol, memaknai isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. (Dedy Mulyana 2008:194)

I. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang terdiri dari Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Penelitian yang meliputi:

Sejarah perkembangan Riau Pos, Sistem kerja Surat Kabar Riau Pos, Sarana dan prasarana, Struktur organisasi keredaksian Surat Kabar Riau Pos.

BAB III : Penyajian Data

Menjelaskan berita pada headline Surat Kabar Riau Pos edisi 1-30 Juni 2011.

BAB IV : Analisis Data

Yang terdiri dari penerapan diksi dalam bahasa jurnalistik pada berita headline Surat Kabar Riau Pos dan Analisis Penerapan diksi pada berita headline Surat Kabar Riau Pos.

BAB V : Penutup yang terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM SURAT KABAR RIAU POS

A. Sejarah Perkembangan Riau Pos

Di penghujung 1988, terjadi pergantian Gubernur Riau dari Mayjen. Imam Munandar yang meninggal karena sakit, kepada Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Drs. Atar Sibero, sebagai pelaksana tugas, sampai ditetapkannya Mayjen. Soeripto sebagai gubernur defenitif terhitung 28 Desember 1988. Berbekal pengalamannya sebagai Waka Dispenad (Wakil Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat), yang dilanjutkan sebagai Pangdam (Panglima Daerah Militer) III “Bukit Barisan” dan Pangkowlhan (Panglima Komando Wilayah Pertahanan) I, Gubernur Soeripto sangat berminat untuk melakukan pembenahan pers Riau.

Pertama sekali, ia memutuskan untuk menghidupkan kembali Media Pemda, dengan semangat baru, para pengelola baru, dan nama baru. Maka di ajukan permohonan pergantian SIUPP dari Warta Karya menjadi Riau Pos, dengan para pengasuhnya Zuhdi SH sebagai Pemimpun Umum merangkap sebagai Pemimpin Redaksi, dan J.K Aris sebagai Pemimpin Perusahaan. Dengan diperolehnya persetujuan Menteri Penerangan tertanggal 28 Agustus 1989, maka mingguan Riau Pos pun mulai beredar dengan melanjutkan nomor edisi warta karya sebelumnya.

Setahun kemudian Riau Pos bernasib sama seperti pendahulunya, yakni mengalami kemacetan karena lemahnya system pengelolaan (Manajemen). Rida K Liamsi mantan pengasug Genta yang hijrah ke Suara Karya Jakarta, Yayasan Penerbit Riau Makmur, pengayom Riau Pos, akhirnya berhasil menemui mitra usaha baru yaitu Jawa Pos Group dari Surabaya. Kerjasama ini terjalin berkat jasa wartawan senior Dahlan Iskan, kolega Rida dari majalah berita mingguan Tempo, Jakarta.

Bulan juni 1990 tercapailah kesepakatan resmi antara YPP Riau Makmur dengan Jawa Pos Group. Pada 17 Januari 1991, Riau Pos mulai merajut sejarah barunya sebagai Koran harian pertama di Riau. Terbukti satu hari berikutnya 18 Januari 1991, Riau Pos terbit perdana sebagai koran harian dengan menyoroti meletusnya perang teluk sebagai *Headline* yang berjudul “ George W Bush yakin tak akan gagal, Saddam janjikan kemenangan”. Terbit delapan halaman.

Saat itu Riau Pos mengusung slogan “Riau Pos Koran Nasional Dari Riau”. Artinya Riau Pos ingin menjadi koran yang sejajar dengan koran nasional lainnya, baik dalam kualitas isi maupun dalam tampilan dan gerakannya.

Tekad Rida K Liamsi dan dibantu oleh Dahlan Iskan sebagai penanggung jawab, menginginkan Riau Pos tidak hanya tampil menjadi sebuah media, namun menjadi sebuah kekuatan, lokomtif, institusi, serta bisnis pers.

Perkembangan perusahaan Surat Kabar Riau Pos, juga dapat dilihat dari oplahnya yang terus bertambah. Terbit perdana dimulai dengan oplah 2500 eksemplar, kemudian merangkak menjadi 7500 eksemplar. Pada tahun kedua

12500 eksemplar, kemudian 18500 eksemplar di tahun keempat. Pada tahun kelima oplah Riau Pos sudah melewati 20000 eksemplar.

Dengan semangat tinggi dan penuh kebersamaan pada tahun keenam sudah menembus 25000 eksemplar. Sedangkan pada tahun ketujuh (1998), sempat menembur 50000 eksemplar. Yaitu pada hari lengsernya Presiden Suharto dan oplah itu bertahan hingga lebih sepuluh hari, walaupun kemudian turun pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga sampai sekarang Riau Pos kukuh di bazar dengan oplah diatas 35000 eksemplar.

Selain dari oplah yang semakin bertambah dalam kurun waktu tujuh tahun. Juga dapat dilihat dari penyebarannya yang semakin meluas. Pada tahun pertama Riau Pos hanya berkonsentrasi di Pekanbaru dan sekitarnya. Sedangkan pada tahun keempat Riau Pos mulai mendistribusikan di sebelas kabupaten/kota di Riau.

Salah satu keberhasilan Riau Pos yakni mampu mempertahankan keberadaan sebagai Surat kabar daerah yang terus terbit dan tidak pernah absen menyapa pembaca setianya. Kecuali hari libur nasional. Artinya dengan terbit berkelanjutan dari tahun ketahun sampai tahu kelima belas, maka Riau Pos sudah berhasil menembus mitos yang dulunya mengatakan bahwa di Riau tidak pernah ada koran yang bisa berumur panjang. Dan menuding orang-orang pers di Riau tidak mampu mengelola Surat kabar secara baik dan professional.

Rentetan kerja selama delapan tahun (1991-1998), ternyata juga menumbuhkan tekad, agar Riau Pos tidak berhenti hanya sebuah institusi penerbitan, institusi idealisme, peluang-peluang yang muncul di era informasi,

memberi inspirasi bagi manajemen Riau Pos dan Jawa Pos Media Group melakukan pengembangan media usaha. Bagi Riau Pos kesempatan tersebut menjadi pendorong bagi dirinya untuk segera menjadi sebuah group.

Setelah sekian tahun Riau Pos berdiri, maka pada 5 Maret 1997 gedung Riau Pos diresmikan oleh Gubernur Riau Suripto Dan Dahlan Iskan. Pada tahun 1998 Riau Pos mengembangkan percetakan menjadi tiga buah Surat kabar harian yang terbit langsung di Riau. Yaitu Riau Pos untuk daratan. Sejori untuk wilayah batam dan sekitarnya, serta Utusan (Pekanbaru Pos sekarang ini).

Tidak hanya itu, pada tahun berikutnya Riau Pos mengembangkan sayapnya untuk koran daerah yang diberi nama Dumai Pos yang terbit di dumai. Selain itu, berdasarkan klasifikasi isi koran, pada tahun 2003 Riau Pos juga membuka koran kusus kriminal yang diberi nama Pekanbaru MX.

Selain mengembangkan sayap diwilayah Riau, pada 1998 Riau Pos juga mengembangkan sayap kewilayah sumatera barat (Sumbar), dengan menerbitkan Padang Ekpers. Sedangkan di wilayah sumatera utara, juga diterbitkan Medan Ekpers. Tidak puas dengan media cetak, Riau Pos juga mulai merangkak ke media elektronik, dari tekad tersebut maka muncullah media elektronik TV di Riau, yang diberi nama Riau TV (RTV).

B. Sistem Kerja Surat Kabar Riau Pos

Sistem kerja Surat Kabar Riau Pos tidak jauh berbeda dengan media cetak lainnya, mulai dari merencanakan peliputan, mencari berita, mengolah hingga memasarkan kepada pembaca. Berita dicari oleh seorang wartawan yang sudah

terlatih, mereka disebar berdasarkan pos masing-masing, mulai dari Kota Pekanbaru hingga ke sebelas Kabupaten/kota yang ada di Riau.

Setiap malam, jam 19.00 Wib diadakan rapat proyeksi yang dipimpin oleh pimpinan redaksi dan diikuti oleh redaktur pelaksana, redaktur, kordinator liputan dan wartawan. Bagi wartawan dalam Kota Pekanbaru wajib mengikuti rapat ini guna membahas gambaran peristiwa yang akan diliput. Lalu wartawan yang berada di daerah menjadi tanggung jawab kordinator liputan dalam pembagian tugas. Setiap waktu redaktur dan korlip mengontrol wartawan dalam mencari berita.

Kemudian pada jam 14.00 Wib wartawan sudah mulai mengetik berita yang sudah di dapat dilapangan tadi. Baik wartawan lokal maupun daerah wajib mematuhi *deadline* pukul 17.00 Wib. Setelah berita didapat dan dimuat oleh wartawan dan menentukan berita unggulan, tugas redaktur langsung mengedit dan menyunting berita yang sudah ditulis oleh wartawan agar enak dibaca.

Dalam hal ini redaktur sejatinya memperhatikan ejaan, tanda baca dan pilihan kata dimana kerap kali terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam memenuhi unsur berita.

Setelah berita diedit oleh redaktur, lalu tugas redaktur pelaksana sebagai penanggung jawab dalam mengecek ulang berita yang sudah ditulis dan diedit oleh wartawan dan redaktur. Lalu keputusan akhir berada di tangan pimpinan redaksi, apakah suatu berita itu layak diterbitkan atau tidak.

Setelah berita disetujui oleh pemred, bahan berita lalu diserahkan kepada lay outer sebagai penanggung jawab perwajahan. Melalui laya outer lalu bahan berita yang sudah dibentuk tata letak diserahkan kebagian percetakan.

Untuk Surat Kabar Riau Pos, *deadline* cetak tepat pada pukul 12.00 WIB. Cetak pertama diawali rubrik metropolis. Karena metropolis berisi berita seputar Kota Pekanbaru yang *deadlinenya* cenderung lebih cepat. Kemudian dilanjutkan rubrik Pro Riau. Proses cetak untuk Surat Kabar Riau Pos tersebut dimulai pukul 12.00 Wib, kemudian selambat-lambatnya pukul 04.00 Wib sudah selesai di cetak. Kecuali ada berita mendadak yang harus ditunggu, maka cetak juga harus ditunda. Setelah selesai cetak pada pukul 04.00 WIB, surat kabar sudah mulai di distribusikan ke daerah-daerah.

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Surat Kabar Riau Pos hampir sama dengan alat penunjang media cetak pada umumnya. Namun kelebihan Riau Pos sudah menggunakan teknologi canggih yang jarang digunakan oleh media lain, Riau Pos sudah memiliki *Machintos* dan sudah menggunakan sistem Computer To Plate (CPT) dalam proses percetakan.

Selain itu kertas cetak, peralatan elektronik yang mendukung pembuatan dan pengolahan berita seperti komputer dan juga alat-alat pendukung lainnya untuk memudahkan jalannya roda perusahaan seperti alat transportasi untuk mengantarkan koran ke berbagai daerah kabupaten/kota di Riau.

D. Struktur Organisasi

Bisnis perusahaan pers prinsipnya merupakan perpaduan dari 3 bidang. Yaitu bidang keredaksian, percetakan dan bidang perusahaan. Ketiga bidang tersebut dalam melaksanakan tugasnya mesti saling terkait dan terikat antara satu dengan yang lain, terhadap penyelesaian pekerjaan masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Namun, antara perusahaan dan redaksi tidak dapat dicampuradukkan.

Masing mereka mempunyai tanggung jawab serta peran dan tujuan yang sama, yaitu manajemen penerbitan pers. Harus mampu menciptakan, memelihara dan menerapkan sistem kerja yang profesional, dengan menumbuhkembangkan rasa kebersamaan diantara sesama personil. Itu semua dimiliki oleh setiap perusahaan pers apapun juga. Secara sederhana organisasi perusahaan penerbitan Surat Kabar Harian Pagi Riau Pos sebagai berikut :

1. Pimpinan Umum (Pimum)

Pimpinan umum adalah orang pertama dalam suatu perusahaan penerbitan pers yang mengendalikan perusahaannya baik di bidang redaksional maupun bidang usaha. Pimpinan umum bisa juga pemilik dari perusahaan itu sendiri. Di Riau Pos presiden komisaris dipegang oleh Dahlan Iskan, komisaris Alwi Hamu, Presiden direktur Rida K Liamsi, Direktur Zuhdi, Makmur.

2. Pimpinan Perusahaan

Adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari pemimpin umum untuk membantu dalam pengelolaan di bidang usaha. Pemimpin

perusahaan mendapat kepercayaan penuh untuk mengendalikan usaha agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya guna kesejahteraan karyawan. Pemimpin perusahaan dalam melakukan tugas dibantu oleh beberapa manajer antara lain :

a) Manajer umum

Tugasnya menyediakan kebutuhan bagi perusahaan, baik peralatan kantor, seperti gedung perkantoran, mesin percetakan dan lain-lain, (bersifat *hard ware*). Sedangkan kebutuhan jumlah karyawan, peningkatan karyawan dan lain-lain (bersifat *soft ware*). Dalam melakukan tugasnya manajer umum bertanggung jawab terhadap pemimpin perusahaan, akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan *hardware* dan *software* harus berkonsultasi terhadap redaktur pelaksana terlebih dahulu. Di perusahaan media Riau Pos, Manajer Umum dipimpin oleh Lastriani.

b) Manajer Keuangan

Pada perusahaan media Riau Pos, manajer keuangan mengendalikan keuangan perusahaan yang meliputi menghitung pemasukan dan pengeluaran uang. Menyimpan serta membayar uang, selain itu juga bertugas memungut dan membayarkan pajak, membayar kebutuhan operasional perusahaan serta mengumpulkan kekayaan perusahaan. Manajer umum bertanggung jawab terhadap pemimpin perusahaan. Di Riau Pos yang menjadi manajer keuangan adalah Julita Saidi.

c) Manajer Sirkulasi

Sirkulasi dalam perusahaan pers adalah “peredaran”, bagian ini merupakan komponen perusahaan yang khusus dalam penjualan produk. Seperti menjual produk penerbitannya (Surat kabar). Menjual iklan dan layanan pelanggan. Riau Pos yang menjadi manajer sirkulasi mengurus perjalanan produk penerbitannya, mulai dari keluar percetakan, sampai kepada pelanggan atau pembacanya. Manajer sirkulasi ini bertanggung jawab terhadap pemimpin umum perusahaan Riau Pos. untuk laku atau tidaknya penerbitannya tersebut dipasaran. Jadi orang yang duduk dibagian sirkulasi ini paham terhadap pangsa pasar penjualan, karena laku atau tidaknya produk dipasar tergantung pada bagian sirkulasi. Perusahaan media Riau Pos yang menjadi manajer sirkulasi adalah Zulmansyah Sakedang.

d) Manajer Iklan

Bagian ini bertugas menjual kolom yang ada pada Surat kabar, dalam bentuk *advertising*. Manajer iklan harus mampu membedakan mana informasi yang bisa dikemas menjadi iklan dan mana yang diperuntukan berita. Bagian ini harus bekerja sama dengan redaktur pelaksana supaya bisa membagi tugas. Dalam melaksanakan tugasnya manajer mempunyai staf yang menangani administrasi yang bertugas mencatat order, menagih pembayaran. Manajer iklan Riau Pos bertanggung jawab kepada pemimpin

perusahaan, dalam hal menentukan harga iklan. Di Riau Pos sebagai manajer iklan dipegang oleh Adina Syukur.

3. Pemimpin Redaksi

Pemimpin Redaksi adalah orang yang pertama bertanggung jawab terhadap semua isi dari penerbitan Surat kabar. Selain itu juga bertanggung jawab jika terdapat tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi penerbitan yang diterbitkannya. Pemimpin redaksi dibantu oleh sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, wartawan dan koresponden. Pada Surat Kabar Riau Pos, pemimpin redaksi semenjak pertama kali penerbitan, hingga kini telah banyak pergantian pemimpin redaksi yang diangkat sesuai dengan kualitasnya. Pada tahun 2011 ini yang menjadi pemimpin redaksi Riau Pos adalah Raja Isam Azwar, wakil pemimpin Samsul Bahri Samin, Abdul Kadir Bey, Yasril. Dalam melaksanakan tugasnya pemimpin redaksi dibantu oleh :

a) Redaktur Pelaksana

Di Riau Pos dibawah pemimpin redaksi adalah redaktur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional penerbitan sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin redaksi. Selain itu juga, redaktur pelaksana memimpin aktifitas peliputan dan pembuatan berita para reporter / wartawan, yang dibantu oleh koordinator liputan (korlip) dan redaktur halaman. Di perusahaan media Riau Pos yang duduk di redaktur pelaksana adalah : Menrizal Nurdin, Nurijah Johan, hari B Korun, Ahmad Fitri, Purnama Sari.

b) Wartawan Reporter

Wartawan atau reporter merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan media baik cetak maupun elektronik. Karena reporter bertugas mengumpulkan dan membuat berita. Di tangan merekalah struktur redaksional bisa bekerja dalam memenuhi kebutuhan pemberitaan untuk disajikan. Di Riau Pos terdapat enam wartawan Pekanbaru dan 12 wartawan daerah yang tersedia diseluruh kabupaten yang ada di Riau.

Struktur Organisasi

Pembina Manajemen	: Dahlan Iskan
Komisaris Utama	: Rida K Liamsi
Komisaris	: Asparaini rasyad, Dorothea Samola, H. Amril Noor, Raznizal Syukur
Direktur Utama	: Makmur
Direktur	: Satrianto, Asnida Syukur,
Wakil Direktur	: Kazzaini Ks, Ari Purnama, Zulmansyah Sakedang, Raja Isyam Azwar
Pemimpin Umum	: Zulmansyah Sakedang
WaPimum/Pim. Perusahaan	: Asnida Syukur
Wakil Pimpinan Umum	: Herianto
Pimpinan Redaksi	: Raja Isyam Azwar

Wakil Pimpinan Redaksi	: Asmawi Ibrahim, M. Nazir Fahmi, Harry B Koriun, Yasril
Dewan Redaksi	: Sutrianto, M. Nazir Fahmi, Raja Isyam Azwar, Herianto, Hari B Koriun, Asmawi Ibrahim, Yasril, Zulmansyah.
Redaktur Pelaksana	: Purnimasari, Yose Rizal, Abdul gafur, Buddy Sofwan, Khairul Amri, Andi Novirianty, Deslina.
Penanggung Jawab / Desk	: Nurizah Johan, Fopin A Sinaga, Edwir Sulaiman,
Koordinator Liputan	: Firman Agus
Asisten Koordinator Liputan	: Gema Setara, Fedli Aziz
Redaktur / penjab Halaman	: Helfizon Assyafei, Jarir Amru, Aznil fajri, M Husni CH, Renaltie Lubis, Herianto Baserah, M Amin, Ade Chandra, Deni Adrian, Said Mufti (Foto),
Asisten Redaktur	: Mashuri Kurniawan, Erwan sani, M. Hafiz, Lismar Sumirat,
Reporter	: Idris Ali, Hermanto Ansam, Zulkifli Ali, Munazen Nazir, Muslim Nurdin, Marrio Kisaz, Syahrul Mukhlis, Adrian Eko, Joko Susilo, Agustiar.
Wartawan Foto	: Zainudin Boy, Mirsal
Reporter daerah	: oli wahyuni, Rina Dianti Hasan (Kampar), Abu Kasim (Siak), Engki Prima putra (Rohul), Desriandi Chandra (Kuansing), Evi Suryati

(Bengkalis), Sukri Datasari Al Pauli (Duri), Shari

Ramlan (rohil),

Asisten manajer Umum

Bidang Redaksi : Mindo Ani Riani

Sekretaris redaksi : Rike Febriani, Nirwana

Departemen Perwajahan dan Pra Cetak

Asisten Manajer Perwajahan : Mega

Bagian Perwajahan ; Supri Ismadi (kepala), Andi Zalmi (Koor
Perwajahan Ahad), Syukri, Mardias Chan, Afandi,
Dewi Anggraini, Katon Sungkowo.

Bagian desain grafis : Aidil Adri (Kepala), Iwan Setiawan, Dedi
Sungkono, Desriman Zahmi,

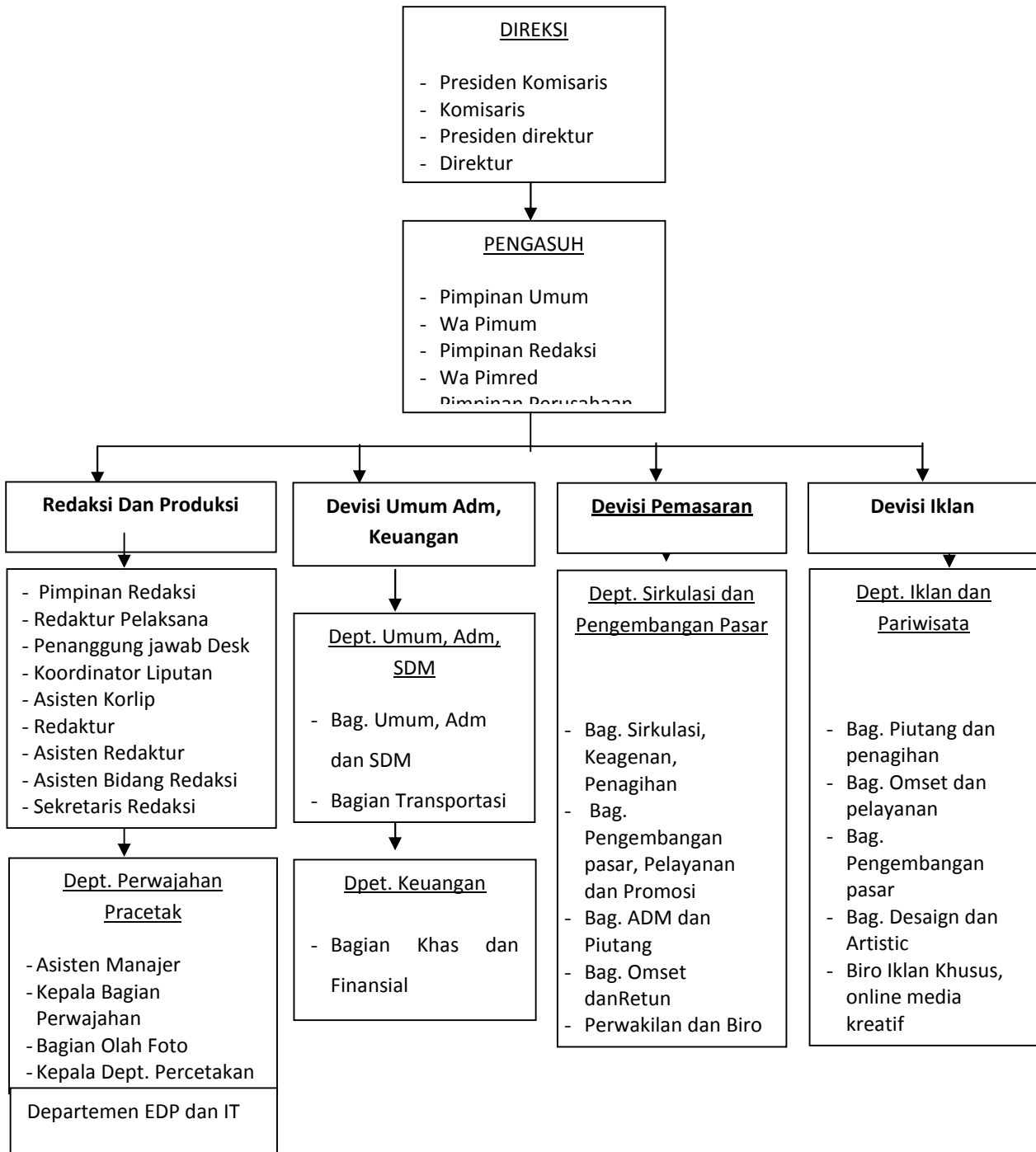
Bagian Pemeliharaan Alat : Khairunas, Akhari

Departemen EDP & IT : Hendriwanto, Mispan, Jhoni Lam, Quraisin.

Departemen News portal : Idris Ahmad (kepala), Liva Yulianto, Rasmur,
Wimberdi.

STRUKTUR ORGANISASI

PT. RIAU POS INTERMEDIA PEKANBARU



Sumber : Dokumen Riau Pos Tahun 2011

BAB III

PENYAJIAN DATA

Berita Pada *Headline* Surat Kabar Riau Pos

Pada penelitian ini penulis akan menganalisa data dengan menggunakan pendekatan metode analisis isi deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat. Penarikan kesimpulan dengan cara data yang diperoleh lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah penulis membuat konsep operasional pada BAB I (Pendahuluan), maka dalam BAB ini akan disajikan data-data berita yang telah dikumpulkan. Berita yang penulis sajikan yakni berita pada *Headline* Surat Kabar Riau Pos edisi 1-30 Juni 2011.

Pada edisi Juni 2011 tersebut, Surat Kabar Riau Pos menyuguhkan berbagai peristiwa lintas lokal maupun nasional dengan tema yang berbeda, seperti: Hukum, Kriminal, Politik, Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Dalam waktu satu bulan itu, ada Sembilan berita yang masuk dalam tema hukum dan politik. Dalam penelitian ini penulis hanya menganalisa tema berita hukum dan politik saja. Selain dari tema itu tidak termasuk dalam penelitian penulis.

Adapun berita *Headline* yang memiliki tema Hukum dan Politik tersebut yaitu:

A. Riau Pos Edisi Rabu, 1 Juni 2011

Menpora Cari Aman

MENPORA Andi Mallarangeng menepati janjinya untuk datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (31/5), terkait kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 Palembang yang menyeret anak buahnya Sesmenpora Wafid Muharam sebagai tersangka.

Dia langsung menepis pengakuan Sesmenpora Wafid bahwa dia memberi persetujuan terkait penggunaan dana talangan. “ Saya tak pernah di lapori,” katanya. Kubu tersangka Sesmenpora Wafid Muharam pun menyayangkan pengakuan Andi yang tak mengetahui penggunaan dana talangan di Kemenpora. Erman Umar, Kuasa Hukum Wafid mengatakan, Andi mencari aman. “ Bisa jadi Pak Mentri (Andi) khawatir kalau dia disangkutkan dalam perkara ini, “ kata Umar.

Mantan juru bicara kepresidenan itu diperiksa selama tiga jam. Menurut Andi, Kemenpora selama ini tak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan dana talangan dalam proyek-proyek Kemenpora. “(Kalau ada dana talangan) itu bukan kebijakan resmi Kemenpora,” imbuhnya.

Sekretraris Dewan Pembina Demokrat itu juga membantah tudingan bahwa dia adalah pelapor peristiwa suap yang dilakukan Mohammad El Idris ke Wafid melalui Mindo Rosalina Manulang. Bahkan, Andi mengaku kaget mendengar peristiwa itu.

Andi datang sekitar pukul 9.30 menggunakan mobil dinasnya Toyota Crown Royal dengan plat nomor RI 45. Begitu datang dia langsung masuk ke

gedung KPK untuk menemui para penyidik tanpa banyak bicara. Sekitar pukul 13.00, Andi keluar dari gedung KPK.

“ Saya sudah memberikan keterangan panjang lebar ke penyidik KPK,” kata Andi saat ditemui usai menjalani pemeriksaan. Dia menerangkan, dalam pemeriksaan kemarin, posisinya sebagai saksi kasus suap proyek Wisma Atlet.

Dia enggan menyebut berapa pertanyaan yang diajukan penyidik,” Ada berapa pertanyaan (yang diajukan penyidik),”ucapnya. Yang jelas, itu seputar jabatan dan tanggung jawabnya sebagai seorang Menpora. Ia memberi penjelasan tentang penggunaan anggaran pembangunan Wisma Atlet.

Dia hanya tersenyum saat ditanyakan apakah dia diperiksa terkait penggunaan dana talangan yang digunakan dalam pembangunan Wisma Atlet. Seperti diketahui, mantan Sesmenpora yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka Wafid Muharam selalu menyampaikan bahwa uang Rp 3,2 Miliar yang diperoleh dari PT Duta Graha Indah adalah dana talangan.bahkan dalam beberapa kesempatan Wafid mengaku selalu melaporkan penggunaan dana talangan saat rapat bersama Andi.

Namun saat ditanya tentang dugaan keterlibatan Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekannya di demokrat, Andi lebih memilih tutup mulut. “Sudah, sudah,” jawabnya lalu masuk ke mobil dinas.

Menurutnya kuasa hukum Wafid, Erman Umar, tak mungkin Andi tak tahu adanya dana talangan pada proyek Sea Games 2011. Sebab, dalam beberapa kali rapat yang diikuti Menpora, Wafid selalu mengungkapkan bahwa perhelatan Sea

Games di Tanah Air perlu dana yang sangat luar biasa. Di rapat-rapat itu pun Wafid mengaku perlu dana talangan untuk proyek pembangunan Wisma Atlet.

“Memang tidak ada tanggapan boleh atau tidak (menggunakan dana talangan)dari menteri. Tapi dia pasti tahu,”ucapnya. Nah, dengan tidak tegasnya perintah yang dikeluarkan Andi, maka Wafid menganggap dana talangan adalah hal biasa. “*Lha* kalau tidak dari talangan *gimana*. Dana resmi dari APBN dan lainnya turunnya telat. “ imbuhnya.

Memang, pihak Wafid mengetahui, sebenarnya penggunaan dana talangan tak dibenarkan. Namun, Erman bersikeras pihaknya harus melanggar aturan demi kepentingan bangsa. Sebab, jika tak dimanfaatkan dana talangan, semua program akan terhambat.

Wakil ketua KPK M Jasin menegaskan, pihaknya menghargai Andi karena memenuhi panggilan pihaknya untuk dimintai keterangan. Menurutnya, KPKsangat perlu keterangan dari Menpora terkait kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet. Dikatakan, status Andi adalah sebagai saksi. Andi diperiksa untuk keperluan pengembangan kasus ini. Namun dia enggan menerangkan materi apa saja yang ditanyakan ke Andi.

Juru bicara KPK Johan Budi menegaskan pihaknya akan memeriksa semua pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan kasus ini. Memang, kemarin giliran KPK memeriksa Menpora. KPK memanggil Andi karena memilik bahan-bahan tertentu yang diperlukan untuk memanggilnya. Jadi penyidik KPK tak begitu saja memanggil orang-orang yang terkait tanpa ada alasan dan bahan yang mencukupi.

Apa ada kemungkinan Menpora akan dipanggil lagi? “Oh bisa saja,” jawab johan. Itu dilakukan bila nantinya ada perkembangan lain yang memerlukan kembali keterangan.

Johan mengatakan, *nantinya* keterangan Andi yang diberi kemarin akan dikonfrontasi dengan pihak-pihak lain. Jika *nanti* setelah itu keterangan Andi dan tersangka tak sesuai, maka tak menutup kemungkinan KPK *akan* kembali memanggil Andi.

Johan mengaku KPK belum ada rencana *tentang kemungkinan* memanggil Andi dan tersangka kasus suap Sesmenpora secara bersamaan untuk dikonfrontasi. Bahkan, KPK juga belum berencana mengkonfrontasi Andi dengan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin. “masih jauh itu,”ucapnya.

KPK Proiritaskan

KPK pun sepertinya lebih memilih menelusuri keterlibatan Menpora Andi Mallarangeng dalam kasus suap Wisma Atlet Sea Games Palembang dibanding keterlibatan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Buktinya, hingga kini, KPK belum membuat surat resmi terkait pemanggilan Nazaruddin sebagai saksi dalam kasus suap Sesmenpora. Bahkan untuk jadwal pemanggilan Nazaruddin sendiri KPK belum menentukan.

“Kalau rencana (memanggil Nazaruddin) benar, tapi teknisnya belum tahu, kata juru bicara KPK Johan Budi kemarin (31/5). Selain mengumpulkan bahan-bahan, sebelum memanggil seseorang, KPK juga mempertimbangkan ketepatan waktunya. Kini *adalah* saat yang tepat memanggil Andi mallarangeng. Sedang

untuk Nazaruddin, menurut Johan waktunya bukan sekarang. “itu semua pertimbangan penyidik,”ucapnya.

Namun, johan menggelak jika hal itu dikaitkan dengan dugaan keterlibatan Andi dalam kasus ini lebih dekat dibanding dengan keterlibatan Nazaruddin. Yang jelas, keduanya diperlukan masih sebagai saksi.

Saat ditanya apakah KPK segera meminta pencabutan paspor untuk Nazaruddin yang hingga kini masih ada di Singapura, Johan mengatakan belum perlu. Setakat ini belum ada itu seperti yang dilakukan KPK terhadap Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek perjalanan kemenangan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom.

Namun, **bagaimanapun juga**, KPK tetap berharap Nazaruddin segera kembali ke Tanah Air **sehingga nanti** bisa memenuhi panggilan sebagai saksi demi kelancaran pengungkapan kasus suap Sesmenpora. (Kuh/jpnn)

Penyajian data berita Riau Pos Edisi 1 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf Pertama

Kata Abstrak terdapat pada judul berita yaitu : **Cari Aman**

Kata tidak lugas yaitu: **untuk datang**

Kata bernilai rasa yaitu : **anak buah**

Paragraf dua

Kata Umum yaitu : **bahwa**

Kata tidak lugas yaitu: **pun**

Paragraf tiga

Kata tidak lugas yaitu untuk

Paragraf empat

Kata bersinonim yaitu: kaget

Paragraf lima

Kata tidak lugas yaitu: begitu datang, tanpa banyak bicara

Paragraf delapan

Kata tidak lugas yaitu: Seperti diketahui, bahwa

Paragraf sembilan

Kata tidak lugas yaitu: namun saat ditanya tentang dugaan

Paragraf sepuluh

Kata tidak lugas yaitu: bahwa, dirapat-rapat

Kata abstrak yaitu: sangat luar biasa

Paragraf tiga belas

Kata bersinonim yaitu: menegaskam, pihaknya

Kata tidak lugas yaitu: untuk dimintai keterangan, dikatakan

Paragraf empat belas

Kata tidak lugas yaitu; Memiliki keterkaitan erat dengan kasus ini

Kata umum yaitu: bahan-bahan tertentu

Paragraf lima belas

Kata tidak lugas yaitu: Apa ada kemungkinan Menpora akan dipanggil lagi? “Oh bisa saja,” jawab johan. Itu dilakukan bila nantinya ada perkembangan lain yang memerlukan kembali keterangan.

Paragraf enam belas

Kata tidak lugas : *nantinya, yang diberi kemarin, nanti, akan*

Paragraf tujuh belas

Kata tidak lugas yaitu: *tentang kemungkinan*

Paragraf dua puluh

Kata tidak lugas yaitu: *adalah*

Pragraf dua puluh dua

Kata tidak lugas: *Saat ditanya apakah KPK segera meminta pencabutan paspor untuk Nazaruddin yang hingga kini masih ada di Singapura*

Paragraf dua puluh tiga

Kata tidak lugas yaitu: *bagaimanapun juga, sehingga nanti*

B. Riau Pos, Edisi Kamis 2 Juni 2011

KPK Cecar Hatta Rajasa

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa seorang menteri yang tersangkut kasus korupsi. Setelah Selasa (31/5) lalu memanggil Andi Mallarangeng, Rabu (1/6) giliran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Hatta diperiksa terkait dugaan kasus korupsi kereta rel listrik (KRL) hibah dari Jepang pada 2006 saat dia menjabat Menteri Perhubungan. *Namun* calon besan Presiden SBY ini tak menggunakan mobil dinas kementerian saat tiba ke gedung KPK sekitar pukul 7.30 WIB.

Hatta yang kemarin mengenakan batik coklat lengan panjang tak begitu lama menjalani pemeriksaan. Sekitar pukul 9.15, Hatta keluar meninggalkan gedung KPK. Hatta irit bicara saat ditanya seputar pemeriksaannya. “Saya memberi penjelasan sesuai warga Negara terkait masalah hibah KRL dari Jepang,” kata Hatta.

Seperti diketahui, kasus hibah KRL ini sudah menyeret mantan Dirjen Perkeretaapian Sumino Eko Saputro sebagai tersangka. Kasus itu berawal dari penyidikan KPK terkait adanya dugaan korupsi biaya pengangkutan 60 gerbong KRL hasil hibah pemerintah Jepang. Dalam proses hibah, Dirjen Perkeretaapian Dephub Sumino dituduh telah menunjuk langsung perusahaan Jepang Sumitomo Co untuk mengangkut gerbang ke Indonesia.

Berdasar kesepakatan, dana pengangkutan gerbong dibebankan ke pemerintah Indonesia. Biaya pengangkutan itu pun dirasa sangat tinggi, yakni mencapai 9 juta yen (Rp 270 Juta) per unit. Jadi, total pemerintah harus membayar biaya transportasi untuk 60 gerbong kereta itu Rp 43,2 Miliar.

KPK pun mencium adanya ketidak beresan dalam pengangkutan KRL. Diduga, telah terjadi penggelembungan (*mark-up*) hingga Rp 11 miliar. Dalam beberapa kesempatan Sumino menyebut jika Hatta harus ikut bertanggung jawab dalam kasus ini. Katanya, proyek pengangkutan KRL hibah dari Jepang ini atas perintah langsung dari Hatta sedang Sumino hanya menjalankan.

Bahkan, adik kandung Hatta, Ahmad Hafiz Tohir disebut-sebut ikut dalam survei proyek angkutan pengadaan KRL ke Jepang. Namun saat ditanya tentang keterlibatan adik kandungnya, Hatta lebih memilih bungkam. “Itu soal materi,

coba Tanya ke penyidik,” katanya lalu tergesa-gesa masuk ke mobil. “Saya mau hadir keperingatan 1 Juni (di MPR),”imbuhnya.

Berdasar informasi yang dikumpulkan *JPNN*, pemeriksaan Hatta kemarin belum sampai pada materi tentang keterlibatan adik kandungnya. Dalam pemeriksaan yang tergolong singkat itu, politisi PAN itu hanya ditanya tentang persetujuannya dalam hibah pengadaan KRL eks jepang. “Dia juga ditanya tentang soal pertemuan atau rapat antara dia dengan Suemino dkk membahas soal ini,” ucap seorang sumber digedung KPK.

Juru bicara KPK Johan Budi mengaku belum tahu materi pemeriksaan Hatta. “Yang jelas sebagai saksi kasus KRL,” kata johan.

Wakil ketua KPK, M Jasin menegaskan, singkatnya pemeriksaan Hatta itu tak terkait dengan kesibukkan Hatta sebagai seorang menteri. Pemanggilannya kemarin hal yang kebetulan dan Hatta bisa memenuhinya. Pihaknya takkan terpengaruh dengan singkatnya waktu pemeriksaan Hatta. Pemeriksaan kemarin bukan yang terakhir. Bila nantinya penyidik masih perlu keterangan, KPK takkan segan-segan memanggil Hatta.

Ramai-ramai dugaan korupsi kereta hibah dari jepang itu dihembuskan Gerakan Pro Demokrasi (Prodem) pada 2007. Negara diduga menderita kerugian hingga Rp 44,4 miliar. Kasus berawal ketika 1998-1999, di jepang banyak KRL tak bisa beroperasi akibat adanya UU lingkungan hidup yang melarang penggunaan *refrigen Freon* pada AC kereta. Akhirnya, banyak KRL yang dihibahkan atau dijual ke Negara lain.

Indonesia yang memiliki system transportasi KRL-nya sama dengan Jepang merasa itu bisa jadi berharga. Akhirnya, pada 2004, melalui PT Kereta Api (PT KA), pemerintah membeli 16 unit KRL ke Itocu Corporatin Japan dengan harga 8 juta yen per unit untuk KRL seri 103. Itu sudah termasuk biaya angkut dan asuransi. Transaksi tertuang dalam kontrak nomor HK 213/VIII/3/KA.2004.

Pada 2005, PT KA kembali membeli 16 unit KRL seri 8000 pada Tokyu Corporation Jepang dengan kontrak nomor 72/HK/TEK/2005. Harganya sama, 8 juta yen per unit, termasuk biaya angkut dan asuransi. Perbedaan tampak ketika pada 30 November 2006 ditandatangani kontrak nomor 11/KONTR/PSP/XI/2006 antara satuan kerja (Satker) pengembangan sarana perkeretaapian (kementerian perhubungan) dengan Sumitomo Corporation Jepang.

Pemerintah Indonesia cukup membayar biaya pengapalan dan biaya asuransi 60 unit KRL dari Sumitomo Corp, Jepang, terdiri atas 30 unit KRL tipe 5000 milik Tokyo Metro dan 30 unit KRL bekas tipe 1000 dari Tokyo Rapid Railway. Harga untuk barang hibah itu 9,9 juta yen per unit untuk biaya angkut dan asuransi. Yang jadi pertanyaan, KRL yang dihibahkan biayanya lebih mahal dari yang dijual.

Mengenai hal itu *JPNN* pernah menanyakan ke Dirjen Perkeretaapian saat itu, Soemino Eko Saputro. Pria yang kini telah jadi tahanan KPK itu hanya menjelaskan, perbedaan harga dalam pengadaan barang karena pengangkutan 60 unit KRL dilakukan dari dua depo yang jauh dari pelabuhan Kawasaki. “Yaitu di kota Yachio dan Nakano. Perjalanan dari dua kota itu biaya besar,” ungkapnya.

Jalannya penyidikan atas kasus kereta hibah ini tersendat-sendat mirip kereta api kurang bahan bakar. Ditetapkan sebagai tersangka pada November 2009, Soemino baru dimintai keterangan hampir setahun kemudian. Dan akhir maret 2011 lalu sang tersangka baru ditahan. Soemino kabarnya terus berusaha melibatkan bekas atasannya, Hatta Rajasa, yang jadi menteri perhubungan pada 2004-2007.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menambahkan, awal informasi adanya KRL bekas milik jepang itu disampaikan JARTS (lembaga *semi-government* di Jepang) pada 14 Juli 2006. Disebutkan, hanya Sumitomo yang bisa memberi hibah KRL ke pemerintah RI. “Soal harga, semua bisa dipertanggungjawabkan Sumitomo,” ujarnya. (kuh/fal/jpnn)

Penyajian berita Riau Pos Edisi 2 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf pertama

Kata bersinonim yaitu: cecar

Paragraf dua

Kata tidak lugas yaitu: namun

Paragraf empat

Kata tidak lugas yaitu: seperti diketahui

Paragraf tujuh

Kata tidak lugas yaitu: tergesa-gesa

Paragraf delapan

Kata tidak lugas yaitu: yang tergolong

Pragraf sepuluh

Kata bersinonim yaitu: menegaskan, tak

Kata tidak lugas yaitu: seorang

Paragraf sebelas

Kata tidak lugas yaitu: menderita, yang

Paragraf Tujuh belas

Kata tidak lugas yaitu: sementara itu

Kata bersinonim yaitu: menambahkan

C. Riau Pos, Edisi Jumat 3 Juni 2011

Kpk Tangkap Hakim Suap

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap tangan pelaku tindak pidana korupsi. Rabu (1/6) malam, KPK menangkap Syarifuddin, seorang hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di rumahnya, di Jalan Sunter Agung Tengah 5 C/26, Jakarta Utara sekitar pukul 22.55 WIB. Syarifuddin diduga menerima suap dari Puguh Wirawan, seorang kurator dari PT Sky-Campping Indonesia (SCI).

“Semalam (1/6) KPK menangkap Sy (Syarifuddin) dirumahnya di daerah sunter. Sy adalah hakim pengawas Kepailitan PN Jakpus. Dia sebagai penerimanya.” ujar Ketua KPK Busyro Muqoddas melalui layanan pesan singkat pada wartawan di KPK, Kamis (2/6).

Menurut juru bicara KPK, Johan Budi, setelah menangkap. KPK langsung mengeledah rumah Syarifuddin. Hasilnya, ditemukan uang Rp.392 juta dari jumlah itu, diduga uang suap dari Puguh.

Selain dalam bentuk rupiah, KPK juga menyita mata uang asing, yakni 116.128 dolar AS, 245 ribu dolar Singapura, 12.600 KHR (Mata uang Kamboja) dan 20 ribu yen Jepang. Duit dalam pecahan mata uang asing itu ditemukan saat tim penyidik mengeledah lemari dalam pakaian didalam kamar. Sebagian besar uang disimpan disaku-saku pakaian milik Syarifuddin. Semuanya kami sita” untuk kepentingan penyidik” kata Johan. Menurut Johan, KPK juga akan menelusuri apakah mata uang asing yang ditemukan terpisah itu terkait dengan kasus Kepailitan PT SCI atau kasus penyuapan lainnya. Namun tak menutup kemungkinan, itu adalah uang Syarifuddin yang didapat dengan cara yang sah.

Dua buah *handphone* juga turut diamankan dari rumah Syarifuddin” itu diluar *handphone* yang dipegang” sebut Johan. Sedang dari Puguh, KPK mengamankan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih bernomor polisi B 16 PGH.

Dikatakan, penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat. Tim KPK sudah mengintai sejak Rabu (1/6) siang. Masih dihari yang sama sekitar pukul 20.00 Puguh bertamu kerumah Syarifuddin di Jalan Sunter Agung Tengah C/26 Jakarta Utara. Sekitar pukul 22.00, terjadi penyerahan uang dari Puguh ke Syarifuddin, uangnya diserahkan dalam 3 buah amplop berwarna coklat yang diletakkan didalam tas kertas.

Tak berselang lama setelah penyerahan, Puguh pergi dari rumah Syarifuddin. Tim KPK pun langsung menangkap Syarifuddin. Sementara Puguh ditangkap di jalan di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan sekitar pukul 22.45 setelah ada kejar-kejaran sedikit. Setelah ditangkap dan digeledah, Syarifuddin dan Puguh baru tiba di gedung KPK sekitar pukul 02.30, kemarin. Keduanya menjalani pemeriksaan hingga pukul 18.00. Sekitar

pukul 14.00, KPK mengeluarkan Surut Perintah Penyidikan (Sprindik) sekaligus menetapkan Syarifuddin dan Puguh sebagai tersangka.

Johan menjelaskan, uang suap itu diduga terkait proses pengalihan aset milik PT SCI. Tujuan penyuapan, agar Syarifuddin selaku hakim pengawas kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Mengubah status aset PT SCI dari *budel* (pailit) menjadi non-budel. Aset PT SCI yang dimaksud adalah dua bidang tanah di kawasan Bekasi. Dua lahan ini nilainya masing-masing ditaksir mencapai Rp16 miliar dan Rp19 miliar. Aset bernilai total Rp35 miliar terpailit ini diperah dan untuk penjualannya perlu izin dari Syarifuddin sebagai hakim pengawas. Diduga, peran kurator Puguh adalah untuk melobi Syarifuddin. Untuk memuluskan keinginannya, Puguh pun menyuap Rp250 juta. Atas perbuatan ini, Syarifuddin disangka menerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a, b atau c dan/atau pasal 6 ayat (2), pasal 5 ayat (2) dan atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedang Puguh dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf a tau b dan pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya pun ditahan KPK. Syarifuddin dititipkan KPK di Rutan KP Cipinang, sedangkan PW ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. “kita lakukan penahanan kedua tersangka untuk 20 hari pertama,” tutur Johan.

Sedang Syarifuddin dan Puguh saat hendak dibawa ke Rutan sekitar pukul 18.40 petang kemarin, terlihat letih. Setelah menjalani pemeriksaan panjang, keduanya memilih bungkam. Syarifuddin yang mengenakan kaus berkerah warna abu-abu kombinasi hitam, sepertinya tak bisa menutupi rasa malunya. Wajahnya tampak tegang. Ia terus menutupi wajahnya dengan bungkus plastik yang ada ditangannya dari jepretan dan sorot kamera para wartawan.

Ia tidak mengeluarkan satu patah kata pun meski wartawan memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. Ia terpaksa berdesak-desakan dengan jurnalis foto sebelum akhirnya masuk mobil tahanan.

Puguh yang keluar tak lama kemudian raut wajahnya sedikit lebih tenang. Namun sama seperti Syarifuddin, dia juga tidak mengeluarkan komentar apa pun. Berkaus hitam tanpa kerah bergambar Jeep, Puguh tak begitu sulit masuk mobil tahanan KPK lantaran para wartawan fokus mengejar Syarifuddin.

Nama hakim Syarifuddin mulai dianggap bermasalah ketika dia membuat putusan yang mengejutkan terhadap terdakwa korupsi Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin Rabu (25/5) lalu. Syarifuddin merupakan ketua majelis hakim kasus tersebut. Agusrin dituntut hukuman 4,5 tahun karena didakwa membuat rekening di luar rekening resmi kas daerah. Didalam rekening baru itulah diduga duit dibagi-bagikan ke sejumlah pimpinan DPRD dan Agusrin sendiri. Jaksa penuntut umum (JPU) sudah menghadirkan sejumlah alat bukti. Bahkan salah seorang saksi mengatakan dia diperintah membuat dokumen pembukaan rekening anyar. Anehnya, Syarifuddin tak bergeming. Dia memutus Agusrin bebas murni. JPU pun akhirnya kasasi.

Saat memutuskan kasasi itu, kejakung sudah curiga Syarifuddin tak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, Kejaksaan menduga ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan hakim. Tapi, Korps Adhyaksa itu tak menyebutnya “itulah alasan kami ajukan kasasi,” tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Noor Rachmat.

Penangkapan Syarifuddin oleh KPK mengejutkan sejumlah pihak yang pernah berinteraksi dengan dia di PN Jakarta Pusat. Sebab, hakim berambut keriting itu dikenal jauh dari profil hakim bermasalah. Kecuali putusan terhadap Agusrin, putusan Syarifuddin lainnya cenderung tak mencurigakan. Bahkan dia dianggap hakim yang jujur

ketika membebaskan Chairul Saleh, seorang pemulung, yang dijebak polisi membawa ganja.

Dia juga sangat tegas menegakkan tata tertib persidangan. Semua pengunjung sidang harus tertib dan tidak boleh ribut. Bahkan melihat pengunjung yang memainkan ponsel didalam ruangan sidang, dia tak segan menegur hingga mengusir ke luar ruangan. PN Jakarta Pusat menyatakan belum akan mengambil sikap terkait kasus suap tapi siap memberi pembelaan hukum bagi yang bersangkutan. “penyikapan akan kami tentukan setelah kami lapor ke Ketua PN Pusat. Dia berhak dapat pembelaan hukum. Tentu nanti akan kami bicarakan dengan beliau,” urai Humas PN Jakarta Pusat Suwidya. Dikatakan pihaknya tahu perihal penangkapan Syarifuddin dari media. Hingga kini, pihaknya tak bisa menghubungi. “tapi kita sudah member kabar kepada keluarga dan mereka *shocked* mendengar itu,” paparnya.

Terkait kasus pailit PT SCI yang diurus Syarifuddin, Suwidya menyatakan yang bersangkutan merupakan hakim tunggal dalam perkara tersebut. Sebab, Syarifuddin merupakan hakim pengawas untuk perkara kepailitan. “Tidak ada hakim anggota. Jadi dia yang memutus (perkara) sendiri,” tambahnya.

Meski begitu, menurut dia, dalam kesehariannya, Syarifuddin merupakan pribadi yang baik. Dia juga dikenal memiliki kontrol diri yang baik serta mampu mengambil keputusan dengan baik. “Karena itu, beliau sering dipercaya pimpinan untuk menangani perkara,” imbuhnya.

Dibagian lain, Komisi Yudisial (KY) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera memberhentikan Syarifuddin, begitu proses hukum berjalan. Menurut Juru Bicara KY Asep Fajar, hal itu diatur dalam pasal 15 PP 26 Tahun 1991. “ Di situ sudah diatur tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara, yang sampai sekarang masih berlaku begitu. Melihat proses

hukum akan segera berjalan, yang bersangkutan harus secepatnya diberhentikan sementara,” tegasnya. KY juga menyesalkan tindakan yang dilakukan Syarifuddin. Sebab, dugaan penerimaan suap ini terjadi saat banyak pihak tengah mengupayakan memperbaiki kinerja dan citra dunia peradilan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menyayangkan hal itu. “Ini adalah sisi negatif, karena ternyata masih ada hakim yang nakal. Ya bagus kalau KPK bisa menangkap hakim nakal. Berarti KPK lebih galak lagi. Penegakan hukum jalan kalau gitu,” katanya.

Syarifuddin adalah hakim kedua yang ditangkap KPK. Sebelumnya, KPK juga pernah menangkap Ibrahim, hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI lantaran menerima suap dari pengusaha DI. Sitorus terkait sengketa kepemilikan tanah.

Selain hakim, KPK juga sudah pernah menangkap dua orang jaksa. Jaksa pertama yang ditangkap KPK adalah Urip Tri Gunawan lantaran menerima uang dari Artalyta Siuryani. Sedangkan jaksa kedua yang ditangkap adalah Dwi Seno Widjanarko yang diduga memeras (**kuh/aga/ken/ara/jpnn**)

Penyajian berita Riau Pos Edisi 3 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf Tiga

Kata bersinonim yaitu: menurut

Kata tidak lugas yaitu: dari jumlah itu

Paragraf Empat

Kata bersinonim yaitu: menurut, tak

Kata tidak lugas yaitu: dalam pecahan mata uang asing, Sebagian besar

Paragraf Lima

Kata tidak lugas yaitu: juga, dari rumah syarifuddin

Paragraf Enam

Kata tidak lugas yaitu: dikatakan, masih dihari yang sama, uangnya diserahkan

Paragraf Tujuh

Kata tidak lugas yaitu: tak berselang lama

Paragraf delapan

Kata tidak lugas yaitu: untuk

Paragraf Sembilan

Kata tidak lugas yaitu: sedang, syarifuddin dan puguh, yang ada, hendak, wajahnya

Paragraf sepuluh

Kata tidak lugas: dengan berbagai, akhirnya

Paragraf empat belas

Kata bersinonim yaitu: urai,

Kata tidaklugas yaitu: yang, akan, dikatakan

D. Riau Pos, Edisi 4 Juni 2011

Hakim Suap Bebaskan Koruptor

Kasus lain Syariffudin juga diusut

PENANGKAPAN Hakim Syarifuddin Umar atas kasus suap terkait kasus kepailitan PT Sky Camping Indonesia (SCI) memperburuk citra peradilan Indonesia. Meski dinilai sebagai hakim yang baik, dalam perjalanan karirnya, Syarifuddin ternyata memiliki setumpuk catatan miring terkait sejumlah kasus

korupsi yang pernah diurusnya, salah satunya vonis bebas Gubernur Bengkulu Agusrim Najamuddin. Diduga terdapat indikasi suap dalam kasus dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan senilai Rp. 22,5 miliar itu. Selain itu sederet reputasi Syarifuddin yang membebaskan para koruptor juga menjadi catatan.

Mulai kasus korupsi kredit fiktif BNI dengan nilai kerugian Negara sebanyak Rp. 27 miliar dengan terdakwa yang dibebaskan yakni Basri Adbah (direktur PT A'Tiga). Hingga kasus korupsi pengadaan pupuk sebanyak 12 ribu ton PTPN XIV. Syarifuddin membebaskan dirut PTPN XIV, Damayanto Sutedjo yang sebelumnya dituntut dua tahun penjara.

Meski mengaku belum menemukan bukti, KPK siap menelusuri semua reputasi Syarifuddin ini. wakil ketua KPK Moehammad Jasin menyatakan penyelidikan bisa dilakukan setelah menemukan alat bukti “KPK akan mengumpulkan informasi dari data lebih dulu. Ya tergantung pengembangan penyelidikan, bukti dan saksi itu perlu. Tentunya KPK sebagai lembaga hukum akan bekerja secara profesional didasarkan atas bukti-bukti itu kita proses secara hukum itu yang perlu kita fokuskan.” papar Jasin, jum’at (3/6).

Jasin menegaskan kini komisinya masih konsentrasi menyelidiki Syarifuddin dalam kasus dugaan suap PT SCI. KPK pun belum berencana memeriksa hakim pengawas kepailitan itu perihal vonis bebas Agusrin. “yang kita proses hukum adalah peristiwa pidana atas suap menyuap itu. Jika atas dugaan putusan bebas kasus yang lain (Agusrin) tentunya kita belum fokus kesana. Artinya berbeda kasusnya.” Tambahya.

Terkait penyelesaian kasus suap itu sendiri, pimpinan KPK bidang pencegahan ini menguraikan pihaknya segera minta keterangan Syarifuddin dan Kurator Puguh Wirawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. KPK juga megupayakan agar proses pemeriksaan kedua tersangka bisa segera diproses dipengadilan. “secara teknis (pemeriksaan *red*) penyidik KPK yang tahu. Tapi kita berusaha profesional sehingga proses ini tetap berjalan cepat,” imbuhnya.

Selain KPK, Komisi Yudisial (KY) meyakini juga akan mengusut pelanggaran yang dilakukan Syarifuddin. Lembaga Pemantau Peradilan itu akan menelusuri kasus suap tersebut dari segi kode etik, menurut juru bicara KY Asep Racmat Fajar, pihaknya bisa bersama-sama dengan KPK mengusutnya. “kalau secara fungsi KY, kita kan disini pelanggaran kode etik. Jadi sekalipun proses sedang berjalan di KPK, KY akan tetap menelusuri kejadian ini terkait kode etik,” kata Asep.

Sementara itu, sebelum kasus suap ini terjadi. Syarifuddin ternyata memiliki sejumlah catatan miring dalam perjalanan karirnya dan direkam Indonesia Corruption Watch (ICW). Tercatat hakim anggota kasus gugatan dua politikus PKB Gus Choi dan Lyli Wahid ini pernah menjatuhkan vonis bebas ke 39 terdakwa kasus korupsi.

Menurut Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho vonis bebas itu dijatuhkan Syarifuddin selama bertugas di Pengadilan Tinggi Makasar dan PN Jakarta Pusat ”Syarifuddin pernah membebaskan 39 terdakwa kasus korupsi.

Terdakwa kasus korupsi terakhir yang dibebaskan adalah Agusrin Najamuddin. Gubernur Bengkulu non aktif”. Ujarnya.

Emerson menegaskan terdapat dugaan praktis suap dalam pembebasan Agusrin. Ini muncul dari hasil pemantauan KY, “ hasil pemantauan KY juga menduga ada dugaan suap dalam kasus lain yang ditangani Syarifuddin salah satunya yakni kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota DPRD lawu, Sulawesi selatan. Mantan ketua PN makasar ini membebaskan 39 anggota DPRD lawu periode 1999-2004 dalam kasus korupsi APBN senilai Rp. 10,5 miliar. “ Syarifuddin pernah dilaporkan terkait vonis bebas kasus korupsi dan dugaan suap dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan Anggota DPRD Luwu Sulawesi Selatan, “ungkap Emerson.

Karena itu, ICW pun mendorong KPK menelusuri indikasi suap dalam sejumlah perkara yang diadili Syarifuddin. Termasuk vonis bebas Agusrin Najamuddin. Disamping itu lanjut Emerson. Proses penyidikan terhadap tersangka kasus suap tersebut harus diurus sendiri oleh KPK. Ini untuk memastikan proses hukum yang cepat dan menutup peluang korupsi dan kolusi didalamnya. “tidak melimpahkan pada kejaksaan atau kepolisian.” imbuhnya.

ICW juga meminta KPK menuntut Syarifuddin dengan hukuman maksimal sesuai pasal yang mengatur tentang penyuapan dalam UU nomor 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. “ Syarifuddin bisa diancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Ini untuk jera bagi para pelaku dan shock therapy bagi hakim yang lain. “tegasnya . ada yang menarik dalam catatan rekam jejak hakim Syarifuddin dari ICW. Sebagai hakim

PN Jakarta Pusat, Syarifuddin nyaris saja diangkat jadi Hakim Karir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Mahkamah Agung (MA). Namun pengangkatan itu dianulir karena dapat kritikan dari sejumlah kalangan.

Pengangkatan Syarifuddin diputuskan oleh MA lewat surat keputusan (SK) Bernomor register 041/KMA/K/III/2009 tertanggal 18 maret 2009. Tapi, SK itu kemudian dicabut setelah muncul penolakan terhadap Syarifuddin . “karena dikritik sejumlah kalangan seperti media akademis praktisi hukum dan LSM akhirnya SK pengangkatan Syarifuddin umar dibatalkan. “ ujar Emerson.

Dibagian lain, tersangka Syarifuddin melalui kuasa hukumnya Jummart Girsang menyatakan tak terima disebut tertangkap tangan oleh KPK. Junimart menguraikan klainnya justru merasa dijebak KPK. “Ya tentu kalau sudah dijebak udah diarahkan ke sana (penangkapan), *red*), “ tutur Junimart.

Meski begitu, menurut pangacara yang juga pernah membela hakim suap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Ibrahim tersebut, Syarifuddin siap membantah semua tuduhan yang ditujukan KPK kepadanya. Dia juga siap diperiksa untuk menerangkan semuanya, termasuk fakta bahwa dia tak melakukan transaksi suap-menyuap. Itu disampaikan Syarifuddin, saat dijenguk Junimart disel Cipinang. “istilah KPK tangkap tangan itu tak berdasar. Klien saya dirumah sedang tidak melakukan transaksi suap-menyuap,” katanya.

Junimart memaparkan, yang disebut tertangkap tangan saat transaksi suap itu adalah penegak hukum menangkap penyuap dan penerima suap ditempat yang bersamaan dan waktu bersamaan. Namun pada kasus Syariffuddin kliennya itu tak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum saat ditangkap KPK. “

sekarang begini, katanya belia disuap, kalau disuap tentu ada penyuap KPK mengatakan tertangkapnya tangan, dia disebut tertangkap tangan dan ada barang buktinya uang Rp250 juta itu. Tapi dia sendiri. Sementara Puguh Wirayan itu dikejar KPK ke pancoran. Ini kan terpisah,” paparnya.

Syarifuddin pun bersikukuh uang Rp. 250 juta dan uang-uang asing lainnya disita KPK dari rumahnya itu. Bukan suap dari puguh. Uang-uang itu kata Junimart merupakan uang pribadi milik kliennya. “ memangnya klien saya dilarang punya duit. Kan ngak ada larangannya.” Tuturnya.

Seperti diketahui KPK menangkap syarifuddin di kediamannya di Kawasan Pancoran, Jakarta Utara pada Rabu malam (1/6). Dia diduga menerima pemberian uang senilai Rp. 250 juta dari kurator PT sky Camping Indonesia (PT SCI), Puguh juga ditangkap tak lama kemudian setelah Syarifuddin ditangkap di Kawasan Pancoran Jakarta Selatan. Duit suap ini dimaksudkan untuk menganulir keputusan pernyataan kepailitan atau *budel* pailit terhadap asset PT SCI, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan oleh KPK.
(ken/jpnn)

Penyajian berita Riau Pos Edisi 4 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf pertama

Kata tidak lugas yaitu: terkait kasus

Paragraf dua

Kata bersinonim yaitu: dengan

Paragraf empat

Kata bersinonim yaitu: menegaskan

Paragraf lima

Kata tidak lugas yaitu: sendiri

Kata bersinonim yaitu: menguraikan

Paragraf Tujuh

Kata tidak lugas yaitu: sementara itu

Paragraf Sembilan

Kata bersinonim yaitu: menegaskan

Paragraf Sepuluh

Kata bersinonim yaitu: mendorong, disamping, ini untuk

Paragraf Sebelas

Kata bersinonim yaitu: nyaris

Paragraf Tiga belas

Kata bersinonim yaitu: dibagian lain, menguraikan

Paragraf Lima belas

Kata tidak lugas yaitu: Syrifuddin

Paragraf Tujuh belas

Kata tidak lugas: seperti diketahui

E. Riau Pos, Edisi Ahad 5 Juni 2011.

Senin, Syarifudin Dinonaktifkan

KASUS suap terhadap Hakim Syarifuddin terkait kepailitan PT Sky Camping Indonesia (Sky) menjadi tamparan keras bagi Mahkamah Agung. Desakan dari sejumlah pihak pun agar Syarifuddin segera diberhentikan, direspon cepat oleh Lembaga Peradilan Tertinggi tersebut. Besok, Ketua MA Harifin A Tumpa akan meneken Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sementara atas Syarifuddin sebagai Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Iya, jadi Senin (6/6) pak ketua (Ketua MA, *red*) akan menandatangani SK pemberhentian sementara Hakim Syarifuddin. Begitu, kami mendengar kabar kasus suap tersebut, kami langsung bergerak cepat. Tapi baru bisa senin, karena sekarang masih libur dan Bapak masih di luar kota,” papar juru bicara MA, Hatta Ali, Sabtu (4/6).

Hatta yang juga menjabat sebagai Ketua Muda Pengawasan MA tersebut menyayangkan praktik tercela oleh oknum hakim tersebut. Kasus suap tersebut mencoreng citra dunia peradilan, khususnya MA sebagai lembaga peradilan tertinggi. Tambahan lagi, lanjut dia, kasus tersebut terjadi saat MA tengah melakukan pembenahan birokrasi lembaga peradilan.

Hampir seluruh Ketua Peradilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Indonesia, rutin menggelar pertemuan dengan para hakim, agar tetap menjaga integritas. Dalam pertemuan tersebut, ketua pengadilan biasanya juga mengingatkan para hakim untuk tetap lurus dalam menjaga wibawa hakim.

“Tapi ya namanya manusia, masih ada saja yang seperti ini, ini jelas di luar dugaan kami,” katanya.

Namun, dia berharap, dengan adanya kasus tersebut, masyarakat tidak lantas memukul rata bahwa semua hakim buruk. Jangan dipukul rata. “jumlah hakim di Indonesia ini ada sekitar 7000, tapi yang tercela Cuma satu, dua saja,” tambah dia.

Terkait proses hukum atas Mantan Ketua PN Makasar tersebut, Hatta mengatakan, pihak MA sepenuhnya menyerahkan proses tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “kalau bicara proses hukum, sekarang kan sudah berjalan di KPK. Dan kita serahkan hal itu ke pihak yang berwenang yaitu KPK,” imbuhnya.

Sementara itu, KPK juga masih menelusuri kasus suap yang juga melibatkan kurator PT SCI Puguh Wirawan. Namun, lembaga anti korupsi tersebut membantah jika pihaknya sengaja menjebak Syarifuddin supaya tertangkap tangan oleh penyidik saat melakukan transaksi suap-menyuap dengan puguh. Hal itu menanggapi pernyataan kuasa hukum Syarifuddin, Junimart Girsang yang menuding KPK telah menjebak kliennya.

“ Tidak ada itu, kami tidak menjebak atau berupaya menjebak tersangka. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Itu yang kita tindak lanjuti,” papar wakil ketua KPK Haryono Umar.

Pimpinan KPK Bidang Pencegahan tersebut menegaskan, saat penangkapan terdapat barang bukti berupa uang yang diduga hasil penyuapan sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut tersimpan di tiga buah amplop yang diletakkan

dalam tas kertas. selain duit tersebut, juga ditemukan uang dengan berbagai mata uang asing di luar uang suap tersebut. Rinciannya, 84.228 dolar AS, 284.900 dolar Singapura, 20 ribu Yen dan 12.600 KHR (mata uang kamboja,*red*) dan Rp 141.353 juta. Keseluruhan hasil penyuapan tersebut telah disita KPK.

“jadi yang penting dia tertangkap menerima suap dan ada uangnya,” tambahnya.

Ketika ditanya perihal pemeriksaan lanjutan dua tersangka kasus suap tersebut, Haryono menyatakan pemeriksaan akan dilakukan pekan depan. Lembaga superbodi tersebut pun berupaya mempercepat proses pemeriksaan atas Syarifuddin dan Puguh sehingga bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Kami inginnya prosesnya berjalan cepat, tapi ya kami tetap mempertimbangkan segala aspek dan alat bukti yang ada,” imbuh dia.

Seperti diketahui KPK menangkap Syarifuddin di kediamannya di Kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Rabu malam (1/6). Dia diduga menerima pemberian uang senilai Rp 250 juta dari kurator PT Skycamping Indonesia (PT SCI), Puguh Wirawan. Puguh pun ditangkap tidak lama setelah penangkapan Syarifuddin, di kawasan Pancoran, Jakarta. Duit suap tersebut dimaksudkan untuk menganulir keputusan penyertaan kepailitan atau budel pailit terhadap asset PT SCI. keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan oleh KPK. (ken/jpnn/mar)

Penyajian berita Riau Pos Edisi 5 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf Pertama

Kata tidak lugas yaitu: terhadap, pun

Paragraf tiga

Kata tidak lugas yaitu: tersebut

Kata bersinonim yaitu: tambahan lagi, tersebut

Paragraf Empat

Kata abstrak yaitu: untuk tetap lurus dalam menjaga wibawa hakim

Paragraf lima

Kata tidak lugas yaitu: dengan adanya kasus tersebut, bahwa

Kata umum yaitu: jangan dipukul rata

Paragraf tujuh

kata tidak lugas yaitu: sementara itu, juga

Paragraf sembilan

Kata bersinonim yaitu: tersebut, menegaskan

kata tidak lugas yaitu: duit tersebut, uang dengan, tersebut

Paragraf Sepuluh

Kata tidak lugas yaitu: Ketika ditanya perihal pemeriksaan lanjutan dua tersangka kasus suap tersebut

paragraf dua belas

Kata tidak lugas yaitu: seperti diketahui

F. Riau Pos, Edisi Senin 6 Juni 2011

Gubsu Syamsul Arifin Kritis

Kondisi kesehatan Gubernur Sumut (Gubsu) nonaktif, Syamsul Arifin kritis. Mantan Bupati Langkat itu koma sejak sabtu (4/6) dan hingga tadi malam masih belum sadar. Ruang perawatannya dipindah ke Ruang Perawatan Gawat Jantung di lantai II rumah sakit (RS) Jantung Harapan Kita, Jakarta. Sebelumnya, dia dirawat di lantai III yang khusus mengobati pasien pasca operasi.

Tim dokter terus memantau perkembangan Syamsul. Informasi yang berkembang semalam, jika kondisi Syamsul tak membaik, ada kemungkinan pihak keluarga akan membawanya ke RS di Singapura. Lantaran kondisinya kritis, dalam dua hari terakhir ini tak ada pembesuk yang diperkenankan masuk. Hanya keluarga dekat, seperti istri, anak dan menantu yang juga dokter jantung, yang dibolehkan ada di ruang perawatan khusus pasien gawat itu.

Bahkan, Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho pun, tak dibolehkan masuk ke ruang perawatan Syamsul. Gatot sempat dapat penjelasan dan berdialog dengan petugas rumah sakit, yakni Ibrahim Musa dari bagian Humas dan seorang suster bernama Rosmen. Kedua petugas ini menemui Gatot di luar ruang perawatan.

Keduanya pada Gatot menjelaskan kondisi Syamsul yang belum boleh dibesuk siapapun. “Dari sisi kesehatan belum bisa dibesuk, begitu pesan dokter,” terang Rosmen. Gatot coba melobi, dengan mengatakan dia datang beserta rombongan resmi dari Pemprov Sumut. Kali ini, Rosmen punya dalih lain. Katanya, walaupun mau besuk, harus pada jam besuk. Gatot sendiri kemarin tiba

di RS pukul 18.00 WIB. Sementara, jam besuk khusus Ahad hanya satu jam, yakni dari pukul 17.00 hingga 18.00 WIB.

Gatot kembali berharap agar bisa dibolehkan masuk. Kali ini, Rosmen minta waktu untuk menghubungi tim medis yang memantau perkembangan kondisi Syamsul guna memberitahu kedatangan Gatot dan rombongan. Hampir setengah jam Gatot menunggu, lantas dipersilakan masuk. Politisi dari PKS itu hanya sempat masuk ke pintu utama. Bukan masuk ke ruang perawatan Syamsul.

“Katanya, untuk bisa besuk harus pada jam besuk, itu pun harus dapat persetujuan tim dokter,” ujar Gatot begitu keluar dari pintu utama. Ikut dalam Rombongan Gatot antara lain Asisten I Hasiholan Silaen, Irwasda Nurdin Lubis, Plt Sekda Rahmat Sah, dan sejumlah wartawan dari Medan. Rombongan yang menyertai Gatot itu hanya ada di luar pintu utama.

Kemarin petang, begitu sampai di RS, Gatot menjelaskan, dia datang untuk memberi dukungan moral pada Syamsul dan keluarganya. Untuk membantu biaya perawatan, akan menggalang dana dari para SKPD. “Beliau pasti perlu biaya. Sebagai bentuk kekeluargaan, nanti Pemprov akan membicarakan, akan menggalang SKPD-SKPD untuk membantu. Tapi yang lebih penting adalah *support* moral pada keluarganya,” terangnya.

Ditanya mengapa baru membesuk Syamsul setelah Sembilan hari di RS,

Gatot mengatakan dia sangat sibuk dengan urusan dinas. Antara lain hadir di acara yang dihadiri presiden di Pontianak, presentasi disidang kabinet, ada acara promosi wisata, dan sebagainya. Kemarin, sebelum membesuk Syamsul, Gatot

ada acara di kuningan untuk menghadiri acara wisuda anaknya di sebuah pondok pesantren.

Selain itu, Gatot juga mengaku dapat pesan dari adiknya Syamsul, Ondim, agar membesuk Syamsul setelah dua hingga empat hari setelah operasi. “Makanya baru sekarang saya datang,” ujarnya, seraya mengatakan, hubungannya dengan Syamsul baik-baik saja.

Karena kondisi yang masih kritis itu, maka dapat dipastikan Syamsul untuk kedua kalinya tak bisa menghadiri persidangan perkara dugaan korupsi APBD Langkat di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin ini (6/6), yang agendanya adalah pemeriksaan Syamsul sebagai terdakwa. Anggota kuasa hukum Syamsul, Abdul Hakim Siagian menjelaskan, pihaknya sudah mengantongi surat keterangan dokter mengenai kondisi kliennya itu.

Hanya, Abdul Hakim enggan menyebutkan isi dari keterangan medis yang dikeluarkan tim dokter itu. Alasannya, tak etis jika surat yang ditujukan ke hakim Tipikor, disampaikan ke wartawan sebelum diserahkan ke hakim,” Tunggalah besok (hari ini, *red*) di pengadilan,” ujarnya.

Benarkah Syamsul koma? Abdul Hakim tak membantahnya. Hanya dia tak mau mrnggunakan istilah ‘koma’ yang menurutnya bukan bahasa medis. “Koma, titik, tanda tanya, itu kan istilah kawan-kawan wartawan berdasar informasi yang didapat. Saya tidak dalam kapasitas membenarkan atau tidak membenarkan (bahwa Syamsul koma, *red*),” kilahnya.

Suasana di lantai II RS Jantung Harapan Kita sendiri tadi malam tampak ramai. Pasalnya, sejumlah PNS yang bertugas dikantor Penghubung Pemprov

Sumut di Jakarta, juga hadir. Sejumlah kerabat Syamsul juga di sana. Roby, ajudan Syamsul, tampak sibuk mondar-mandir.(sam/jpnn)

Penyajian berita Riau Pos Edisi 6 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf dua

Kata bersinonim yaitu: *lantaran,*

Kata tidak lugas yaitu: *yang*

Paragraf empat

Kata bersinonim yaitu: *keduanya pada gatot*

Paragraf delapan

Kata tidak lugas yaitu: *Ditanya mengapa baru membesuk Syamsul setelah Sembilan hari di RS,*

Paragraf sepuluh

Kata tidak lugas yaitu: *yang*

Paragraf tiga belas

Kata tidak lugas yaitu: *sendiri*

G. Riau Pos, Edisi Rabu 22 Juni 2011

Rp 2,4 T Dana Bansos Dikorup

FORUM Indonesia untuk transparansi anggaran (FITRA) mengungkap dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial (Bansos) tahun 2010 di delapan

kementerian. Nilai totalnya terbilang fantastis, Rp 2,435 triliun. Data itu diangkat FITRA berdasar hasil audit BPK tahun 2011.

“KPK harus segera melakukan penyelidikan,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, kemarin (21/6). Anggaran Bansos adalah transfer uang atau barang yang diberi ke masyarakat *guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap dirinya*.

“Dalam laporan BPK disebut sejumlah kementerian yang anggaran Bansosnya tak mengalir atau penyalurannya tak sesuai peruntukkan,” ujar Uchok.

Dugaan penyimpangan paling besar terjadi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), yakni Rp 1,49 triliun. Rinciannya adalah penyaluran tidak ada atau tidak lengkap laporan pertanggungjawaban keuangannya Rp 1,425 triliun, dana tak disalurkan atau mengendap di pihak ketiga Rp 69,33 miliar, dan penyaluran yang tak sesuai peruntukkan Rp 438,67 juta.

“Semua ini mengindikasikan terjadinya penyimpangan anggaran yang serius di kementeriannya Pak M Nuh,” tegas Uchok.

Penyimpangan *nomor* dua terbesar ditemukan di Kementerian Pemuda Dan Olahraga yang di *nakhodai* Andi Mallarangeng. Dananya mencapai Rp 407,8 miliar. “Pantas saja pemuda dan olahraga kita tak maju-maju dibanding Negara lain. Soalnya anggaran Bansos terjadi penyimpangan dalam penyalurannya,” sindir Uchok.

Berturut-turut penyimpangan dana Bansos lain adalah Kementerian Sosial Rp 236,510 miliar, Kementerian Kesehatan Rp 141,916 miliar, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 93,885 miliar, Kementerian Agama Rp 41,391

miliar, Kementerian Pertanian Rp 14,280 miliar, serta Kemneterian Budaya dan Pariwisata Rp 4,328 miliar.

“Kami tak habis heran, bagaimana bisa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan sengaja dan begitu teganya tak menyalurkan secara benar anggaran Bansos itu,” kata Uchok.

Menurut dia, anggaran Rp 93,885 miliar itu sengaja hanya disimpan atau mengendap pada pihak ketiga, seperti Bank, kelompok masyarakat, atau koperasi. “Kementerian yang dipimpin HELmy Faisal Zaini itu harus segera mengembalikan anggaran Bansos yang tak disalurkan tersebut bersama bunganya,” ujarnya.

Terkait temuan BPK itu, FITRA mendesak DPR, khususnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) untuk memeriksa delapan kementerian.

Anggota BAKN Eva Kusuma Sundari mengatakan BAKN sebenarnya sudah menindaklanjuti temuan ini. Salah satunya dengan “melacak” indikasi penyimpangan itu dengan mempertanyakannya ke sejumlah daerah. Saat kunker BAKN ke sejumlah provinsi, seperti Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan NTB, tegas Eva, indikasi penyimpangan itu memang sangat terasa. “Kami memang menemukannya di lapangan,” ujar politisi PDIP itu.

Menurtut Eva, masa genting aliran dana Bansos terjadi jelang Pilkada. Karena manajemen program yang tak ketat, dana Bansos rawan jadi instrument atau dana kampanye. “Sudah bisa ditebak, tiap daerah yang mau pilkada, penggunaan bansos-nya pasti kacau,” ujarnya.

Saat rapat BAKN dengan KPK, jelas dia, para komisioner KPK mengatakan telah menyiapkan teknikal asisten dengan sejumlah kementerian.

Tujuannya lebih sebagai pencegahan agar dana Bansos tak menjadi jebakan bagi politisi dan penguasa lokal. “KPK sudah coba bekerja dengan pengawas di masing-masing instansi. Tapi, KPK menyesalkan responnya lemah,” kata Eva. (pri/jpnn)

Penyajian berita Riau Pos Edisi 22 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf pertama

Kata abstrak yaitu: guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap dirinya

Paragraf enam

Kata tidak lugas yaitu: nomor

kata bersinonim yaitu: dinakahodai

Paragraf dua belas

Kata abstrak yaitu: jebakan bagi politisi dan penguasa lokal

H. Riau Pos, Edisi Jumat 24 Juni 2011

Pensiun Dini, PNS Dapat Kompensasi

RENCANA pemerintah menawarkan pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampaknya bukan sekadar wacana. Pemerintah mulai menyiapkan aturan yang akan menjadi payung hukum pensiun dini PNS, termasuk bentuk-bentuk kompensasinya.

Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawaty mengatakan, kini payung hukum itu sedang dibahas serius. “Prinsipnya harus dibuka opsi seperti itu. Kalau memang ada berniat pensiun dini lebih baik karena struktur PNS jadi ramping. Nanti akan dihitung kompensasi dan diformulasikan lagi legalitas aturannya,” kata Any Ratnawati di Jakarta, Kamis (23/6).

Untuk menyiapkan legalitas aturan pensiun dini bagi PNS, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpea-KB). “Saya cari dulu aturannya untuk mencari legalnya,” kata Any.

Rencana untuk melakukan pensiun dini di kalangan PNS, menurut Any, sebagai upaya mengurangi beban Negara. Mengingat banyak dari aparatur Negara yang tak produktif lagi bekerja, sementara Negara terus dibebani dengan belanja apaatur yang kadang di beberapa daerah jumlahnya lebih besar dari belanja modal.

“Kita jadi terbebani dengan SDM yang besar namun tak produktif dan menghabiskan uang Negara. Itu salah dan menyalahi prinsip dan harus dibuka opsi pensiun dini,” kata Any.

Menteri keuangan Agus Martowardojo mengatakan pihaknya sangat mendukung bila Kemenpan-RB segera mengkaji legalitas pensiun dini bagi PNS. Dengan adanya mekanisme pensiun dini, produktifitas kerja PNS akan lebih maksimal. Apalagi banyak Pemda yang tak didukung SDM berkualitas.

“Jadi bukan semata penekanan biaya pegawai, tapi lebih penekanan pada peningkatan produktivitas pegawai. Lebih sedikit tentu lebih tinggi produktivitas pegawai,” kata Agus. (afz/jpnn)

Penyajian berita Riau Pos Edisi 24 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf pertama

Kata tidak lugas yaitu: akan

Paragraf empat

Kata tidak lugas yaitu: untuk

I. Riau Pos, Edisi Sabtu 25 Juni 2011

Pekanbaru Coblos Ulang

BABAK baru dimulai dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pekanbaru 2011. Mahkamah Konstitusi (MK), setelah melalui lima kali persidangan, memerintahkan Komosi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh tempat pemungutan suara (TPS).

Ini setelah MK membatalkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Oleh KPU Pekanbaru, 24 Mei 2011 yang Ditetapkan Termohon (KPU)

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pekanbaru Tahun 2011 di seluruh TPS Se-Kota Pekanbaru,” ujar Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan sengketa Pemilukada Kota Pekanbaru di Gedung MK, Jumat (24/4).

Mahkamah berkesimpulan, berdasar penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, MK menilai telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masih dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Dalam kesimpulan disebutkan, eksepsi pihak terkait tak beralasan hukum. “Menolak eksepsi pihak terkait (pasangan PAS),” ucap Mahfud.

Selanjutnya MK juga memerintahkan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), KPU Provinsi Riau dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pekanbaru untuk mengawasi pemungutan suara ulang itu sesuai kewenangannya.

“Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan,” terang Mahfud didampingi tujuh hakim MK lainnya yakni Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadli Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M Akil Mochtar, dan Muhammad Alim. Dalam putusan setebal 174 halaman itu dijelaskan, terbukti telah terjadi pelibatan PNS terutama camat, lurah, RT dan RW secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilukada Pekanbaru untuk memenangkan pihak terkait (PAS). “Tindakan itu melanggar prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil,” ucap hakim mahkamah, Anwar Usman.

Dikatakannya, Mahkamah konsisten dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tak menoleransi pelanggaran yang secara terstruktur dengan

melibatkan pejabat dan PNS dalam Pemilukada untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, diantaranya Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Gresik. (vide putusan MK Nomor 28/PHPU.DVIII/2010, tanggal 24 Juni 2010). Putusan Sengketa Pemilukada Kota Manado (vide putusan MK Nomor 144/PHPU.DVIII/2010, tanggal 3 September 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Pandeglang (Vide putusan MK Nomor 190/PHPU.DVIII/2010, tanggal 4 November 2010). Putusan Sengketa Pemilukada Kota Tangerang Selatan (vide putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010. Dan Putusan Sengketa Pemilukada Kbatapen Tebo (vide putusan MK Nomor 33/PHPU.D-169 IX/2010,tanggal 13 April 2011).

“Semua putusan-putusan tersebut brerkaitan dengan pelibatan PNS yang menyebabkan Pemilukada harus diulang,” terang Anwar.

Sementara itu lanjut Anwar, terhadap dalih pihak terkait (PAS) yang menyatakan pemohon (Berseri) juga melakukan pelanggaran yang sama, yaitu keterlibatan Gubernur Riau dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 2, mobilisasi PNS dan *money politic* (politik uang). Mahkamah tak menemukan bukti yang meyakinkan adanya mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif, yang dilakukan pemohon atau timnya yang melibatkan pejabat dan PNS di Kota Pekanbaru. “Memang ada beberapa kepala dinas, kepala desa, RT, RW yang mendukung pemohon. Tapi hal itu tidaklah serta merta merupakan mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif,” ulasnya.

Seperti diketahui, putusan MK agar dilakukan coblos ulang di Pemilukada Kota Pekanbaru ini adalah kali pertama dalam sengketa Pemilukada Kabupaten/Kota di Riau. Sebelumnya, kabupaten Rohil, Bengkalis, Kuansing, Rohil, Siak dan Kota Dumai juga sempat berperkara di MK.

KPU Siap

Menanggapi putusan MK ini, KPU Pekanbaru selaku penyelenggara Pemilukada menyatakan siap melakukan coblos ulang di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru sesuai perintah MK. "Kita sebagai penyelenggara Pemilukada tentu siap," ungkap ketua KPU Kota Pekanbaru Yusri Munaf ketika ditemui usai persidangan.

Menurutnya, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan, dalam hal ini KPU sebagai pihak penyelenggara. "Jadi KPU harus menjalankannya," tegasnya.

Meski demikian, yang perlu diketahui dalam putusan MK itu tak terdapat kesalahan dari KPU. Tapi lebih mengarah ke pihak terkait (pasanganPAS) yang menyebabkan Pemilikada ulang. "Satu hal yang kita garis bawahi bahwa KPU tidak ada problem dalam penyelenggaraan Pemilukada 18 Mei lalu. Mulai proses yang dijalankan dari awal hingga akhir pemungutan. Seluruhnya sudah sesuai aturan dan perundangan yang berlaku," tukas Yusri.

Kedepan, tambahnya, pihaknya tentu akan lebih fokus dalam penyelenggaraan Pemilukada, sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan termasuk Mahkamah. "Sekarang bagaimana pemungutan suara ulang ini nantinya dilakukan dengan baik dan lancar," tuturnya seraya mengatakan dalam waktu

dekat pihaknya akan langsung membahas soal ini. ”Pekan depan kita akan bahas putusan MK ini di KPU Pekanbaru sekaligus membicarakan langkah selanjutnya,”tuturnya.(yud/aal/lim/afz/rin)

Penyajian berita Riau Pos Edisi 25 Juni 2011 diatas, masih terdapat kesalahan pilihan kata atau diksi dalam sebuah berita, seperti:

Paragraf sepuluh

Kata tidak lugas yaitu: sementara itu, yang, seperti diketahui, adalah

Paragraf dua belas

Kata tidak lugas yaitu: dalam hal ini

paragraf tiga belas

kata tidak lugas yaitu: yang perlu diketahui

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah dilakukan penyajian data dan pengolahan data pada BAB III, maka data tersebut dianalisis secara ilmiah berdasarkan teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini. Analisa data ini guna mengetahui bagaimana penerapan diksi atau pilihan kata pada *Headline* Surat Kabar Riau Pos Edisi bulan Juni 2011.

Dilihat dari tujuan analisis, ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis kualitatif (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan (2) menganalisis makna dibalik informasi, data dan proses suatu fenomena sosial itu.

Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial dan semua atribut dari fenomena sosial itu. Sedangkan menganalisa makna yang ada dibalik informasi, data dan proses sosial suatu fenomena sosial dimaksud adalah mengungkapkan peristiwa emik dan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek-subjek sosial yang diteliti

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis teks dan bahasa yaitu analisis isi (*countent analisis*) dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara

kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknai isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi .

Penggunaan analisis isi untuk penelitian kualitatif tidak jauh berbeda dengan pendekatan lainnya. Awal mula harus ada fenomena komunikasi yang dapat diamati, dalam arti bahwa peneliti harus lebih dulu dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut.

Langkah berikutnya adalah memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis. Kalau objek penelitian berhubungan dengan data-data verbal (hal ini umumnya ditemukan dalam analisis isi), maka perlu disebutkan tempat, tanggal dan alat komunikasi yang bersangkutan, namun kalau objek komunikasi berhubungan dengan pesan-pesan dalam suatu media, perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantarkan pesan itu. (Dedy Mulyana 2008: 194)

A. Penerapan Diksi Dalam Bahasa Jurnalistik di Surat Kabar Riau Pos.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Redaktur Bahasa Surat Kabar Riau Pos Harry B Koriun tanggal 11 Januari 2011. Surat Kabar Riau Pos mengikuti kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar dalam menulis berita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis maupun menyunting berita di Surat Kabar Riau Pos. Wartawan Riau Pos ditekankan untuk menggunakan kalimat sederhana agar pembaca mudah memahami makna dari

informasi yang disajikan, terlebih masyarakat Riau yang heterogen, baik dilihat dari tingkat pendidikan, maupun geografis sangat mempengaruhi tata bahasa yang digunakan dalam menulis berita di Surat Kabar Riau Pos.

Bahasa yang digunakan singkat dan padat, tidak bertele-tele dan syarat dengan informasi. Lugas dalam menggunakan kalimat agar tidak terjadi ambiguitas yang dapat membingungkan pembaca. Satu hal yang penting yakni menarik. Bahasa yang mampu menarik minat baca masyarakat yang berdampak besar pada kualitas dari penyajian berita Koran itu sendiri (Harry B Koriun).

Memilih kata sangat penting dalam menulis sebuah berita agar informasi yang disajikan menarik. Hal pertama yang perlu diperhatikan menghindari pemakaian kata-kata yang dapat menimbulkan multitafsir dan distorsi dari pembaca. Memilih persamaan kata (Sinonim) tidak dapat dipungkiri memang kerap terjadi. Kata Harry B Koriun, kesalahan itu terjadi dampak dari intensitas kerja yang cukup tinggi, sistem kerja kejar *deadline* sehingga wartawan dan redaktur kurang teliti dalam mengoreksi tulisan. Pilihan kata bersinonim biasanya digunakan agar tidak mengaburkan makna dari kalimat sebelumnya, menggunakan kata bersinonim merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan kata dengan suasana yang sebenarnya terjadi.

Adapun hasil analisa penulis tentang penggunaan kata bersinonim yang selalu terjadi pada kata *menegaskan*, *menguraikan* dan *menjelaskan* dari kata tersebut memang memiliki padanan yang berarti sama. Seperti pada penggalan berita berikut:

Pimpinan KPK bidang pencegahan ini *menguraikan*, pihaknya segera meminta keterangan Syarifuddin dan Kurator Puguh Wirawan.

Kata *menguraikan* tidak tepat digunakan, sebab kata *urai* berarti menerangkan satu persatu yang biasanya digunakan dalam menyampaikan data. Jadi kata yang paling netral dan tanpa konotasi lain yaitu *mengatakan*.

Seperti:

Pimpinan KPK bidang pencegahan ini *mengatakan*, pihaknya segera meminta keterangan Syarifuddin dan Kurator Puguh Wirawan.

Selanjutnya pada penggalan berita edisi 4 Juni 2011:

Syarifuddin *nyaris saja* diangkat jadi hakim karir tindak pidana korupsi.

Kata *nyaris saja* tidak tepat digunakan untuk kalimat ini. Dalam bukunya berjudul Bahasa Jurnalistik dan Komposisi, Rosihan Anwar mengatakan kata *nyaris saja* lebih tepat digunakan untuk kalimat yang menjelaskan tentang peristiwa. Seperti *nyaris celaka*. Jadi untuk melengkapi kalimat diatas, kata yang tepat digunakan yaitu *hampir*

Seperti:

Syarifuddin *hampir saja* diangkat jadi hakim karir tindak pidana korupsi.

Surat Kabar Riau Pos selalu menguji berita dengan ketepatan dan kejelasan. Dalam hal ini, kata-kata abstrak yang memiliki makna sulit untuk dipahami. Haris Sumadiria dalam bukunya berjudul Bahasa Jurnalistik (Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis) mengatakan, kata-kata abstrak sering dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang rumit untuk dipahami (Soedjito, 1988:5). Kata abstrak sukar dipahami makna dan maksudnya. Bahasa jurnalistik

tidak menyukai kata-kata abstrak karena hanya membingungkan khalayak pembaca.

Adapun analisa penulis tentang penggunaan kata abstrak terdapat pada penggalan berita berikut:

Anggaran bansos adalah transfer uang atau barang yang diberi kepada masyarakat *guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap dirinya.*

Kata yang dicetak miring diatas merupakan kata abstrak yang sulit untuk dipahami. Kata tersebut sebaiknya dikonkritkan agar jelas maksud dan makna dari tulisan tersebut.

Seperti:

Anggaran bansos adalah transfer uang atau barang yang diberi kepada masyarakat *guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap dirinya.* *Seperti bantuan masyarakat miskin dan pengembangan usaha kecil menengah.*

Pemakaian kata umum dapat mengaburkan makna dari tulisan, sehingga pembaca tidak kurang mendapatkan informasi dari tulisan yang disajikan. Dari analisa penulis, terdapat kata umum yang dipakai wartawan dalam berita yakni pada edisi 1 Juni 2011. Hal ini dibenarkan oleh Hary B koriun bahwa penulis tidak cermat dalam memilih kata. Seperti penggalan berita berikut ini:

Wisma Atlet Sea Games membutuhkan biaya yang *sangat luar biasa.*

Kata sangat *luar biasa* merupakan kata umum yang mengakibatkan makna menjadi kabur. Seharusnya wartawan menulis nominal dari dana talangan pembangunan wisma atlet secara utuh.

Seperti:

Wisma Atlet Sea Game membutuhkan biaya **3,2 miliar**.

Untuk pemakaian kata bernilai rasa, Harry B Koriun mengatakan Surat Kabar Riau Pos berusaha menjunjung tinggi azas kesopanan. Hal ini merupakan suatu pertimbangan dari redaksi mengingat Riau Pos hadir ditengah-tengah masyarakat melayu Riau yang menjunjung tinggi budaya sopan santun. Riau Pos berusaha menghindari bahasa yang dapat menyinggung perasaan dan kata vulgar yang dinilai sangat tidak beretika.

Harry B Koriun tidak memungkiri kesalahan dalam memilih kata kerap terjadi di media massa, salah satu penyebabnya sistem kerja *deatline* membuat wartawan dan redaktur kurang cermat dalam mengamati tulisan. Namun selama masyarakat masih mengerti dan paham maksud dan arti tulisan berarti komunikasi antara media dan masyarakat sudah berjalan lancar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, kekuatan media cetak ada pada tulisan. Ia tidak mungkin bisa mempengaruhi suasana hati dan gejolak perasaan pembaca jika tidak menguasai bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam menyajikan berita Surat Kabar Riau Pos sudah menerapkan prinsip dasar bahasa jurnalistik.

Berita yang disajikan sangat memberikan informasi bagi pembaca, hal ini bisa dilihat dari isi berita yang informatif memenuhi standar nilai-nilai berita. Namun dalam penyajiannya masih kerap terdapat kesalahan dalam melakukan pemilihan kata atau diksi dalam bahasa jurnalistik. Penulis menganalisa diksi dengan beberapa indikator yaitu: kata bersinonim, kata bernilai rasa, kata umum, kata abstrak, dan kata lugas. dari analisa pada bab sebelumnya, penulis menemukan ketidaktepatan menerapkan diksi dalam bahasa jurnalistik antara lain:

1. Kata bersinonim

Dalam jurnalistik, kata bersinonim berarti kata yang sejenis, sepadan, sejajar dan memiliki arti sama. Namun tidak semua kata yang berarti sama, harus disesuaikan dengan suasana kalimat yang ada.

Pada analisa penulis ditemukan ketidaktepatan dalam memilih kata di berita edisi 1 Juni 2011 ada 2 kata. Edisi 2 Juni ada 3 kata. Edisi 3 Juni ada 3 kata. Edisi 4 Juni ada 7 kata. Edisi 5 Juni ada 2 kata. Edisi 6 Juni ada 2 kata. Edisi 22 Juni ada 1 kata. Edisi 24 Juni tidak kata. Edisi 25 Juni ada 1 kata.

1. Kata bernilai rasa.

Secara psikologis, kata bernilai rasa tinggi menunjukkan penghormatan kepada subjek yang sedang dibicarakan.

Pada analisa penulis, ditemukan ketidaktepatan dalam memilih kata atau diksi di berita edisi 1 Juni 2011 ada 1 kata. Edisi 2 Juni tidak ada. Edisi 3 Juni tidak ada. Edisi 4 Juni tidak ada. Edisi 5 Juni tidak ada. Edisi 6 Juni tidak ada. Edisi 22 Juni tidak ada. Edisi 24 Juni tidak ada. Edisi 25 Juni tidak ada.

2. Kata umum

Kata-kata yang luas ruang lingkupnya, semakin umum kata yang dipakai semakin kabur gambarannya dalam angan-angan.

Pada analisa penulis, terdapat ketidaktepatan dalam memilih kata di berita 1 Juni 2011 ada 3 kata. Edisi 2 Juni tidak ada. Edisi 3 Juni tidak ada. Edisi 4 Juni tidak ada. Edisi 5 Juni ada 1 kata. Edisi 6 Juni tidak ada. Edisi 22 Juni tidak ada. Edisi 24 Juni tidak ada. Edisi 25 Juni tidak ada.

3. Kata abstrak

Kata-kata yang menunjukkan suatu sifat, konsep atau gagasan. kata abstrak sering dipakai untuk mengungkapkan ide-ide yang rumit. 1 Juni 2011 ada 3

kata. 1 Juni 2011 tidak ada. Edisi 2 Juni tidak ada. Edisi 3 Juni tidak ada. Edisi 4 Juni tidak ada. Edisi 5 Juni ada 1 kata. Edisi 6 Juni tidak ada. Edisi 22 Juni ada 2 kata. Edisi 24 Juni tidak ada. Edisi 25 Juni tidak ada.

4. Kata lugas

Kata-kata yang bersifat tembak langsung (*to the point*) tegas, lurus, apa adanya, kata-kata yang bersahaja.

Dari analisa penulis, terdapat ketidaktepatan dalam memilih kata lugas seperti berita 1 Juni 2011 ada 14 kata. Edisi 2 Juni ada 7 kata . Edisi 3 Juni ada 9 kata. Edisi 4 Juni ada 5 kata. Edisi 5 Juni ada 7 kata. Edisi 6 Juni ada 4 kata. Edisi 22 Juni ada 1 kata. Edisi 24 Juni ada 2 kata. Edisi 25 Juni ada 5 kata.

Selain itu, kata-kata mubazir yang semestinya tidak penting masih sering terjadi, seperti pemakaian kata-kata penat: *sementara itu*, *disamping itu*, dan *untuk diketahui* menurut Rosihan Anwar kata itu tidak berpengaruh jika dihilangkan, sebaiknya dihilangkan saja agar bahasa yang digunakan menjadi lugas.

Ketidaktepatan dalam memilih kata memang sering terjadi. Hal ini dibenarkan oleh Redaktur Bahasa Surat kabar Riau Pos Harry B Koriun, menurutnya kesalahan itu terjadi disebabkan *intensitas* kerja wartawan yang cukup tinggi, ditambah lagi system kerja tepat waktu (*deatline*) membuat para wartawan dan redaktur kurang koreksi terhadap tulisan. Surat kabar Riau Pos berusaha menerapkan kaidah bahasa jurnalistik sesuai dengan bahasa indonesia yang baik dan benar. Menjunjung tinggi

azas kesopanan mengingat Riau Pos dibaca oleh masyarakat melayu yang menjunjung tinggi azas sopan santun.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang penerapan diksi dalam bahasa jurnalistik pada *headline* Surat kabar Riau Pos edisi 1-30 Juni 2011, maka diakhir skripsi ini merekomendasikan beberapa saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi Jurnalis.

- A. Dalam menulis berita, para jurnalis hendaknya mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Meski bahasa jurnalistik adalah bahasa populer. Namun ada baiknya para jurnalis mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
- B. Para jurnalis hendaknya jeli dalam memilih kata agar tidak terjadi distorsi dan kerancuan dalam tulisan, bahkan kesalahan dalam memilih kata juga dapat memunculkan provokasi.
- C. Para jurnalis mesti mengetahui bahwa diksi tidak semata persoalan teknis memilih kata. Lebih dari itu, diksi menghendaki setiap kata dalam bahasa jurnalistik menjadi hidup, segar, khas dan menunjukkan pesan sesungguhnya seperti yang dikehendaki sipenutur atau narasumber.
- D. Keterbatasan penulis dalam menulis penelitian ini, penulis sadar bahwa karya ilmiah ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis berharap kepada

peneliti berikutnya terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi agar dapat meneliti bahasa jurnalistik dari sudut pandang yang berbeda dan lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rosihan. 1991. *Jurnalistik dan Kompisisi*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2006. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Chaer, Abdul. 2010. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dewabrata, A.M. 2010. *Kalimat Jurnalistik Panduan Mencermati Menulis Berita*. Jakarta: Kompas.
- Effendy, Uchana Onong. 2004. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Harsono, Andreas. 2010. *'Agama' Saya Adalah Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Kovach, Bill & Tom Resentirl. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme Apa yang seharusnya diketahui wartawan dan diharapkan publik*, Jakarta: Yayasan Pantau.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Kerraf, Gory. 2004. *Kompisisi*. Jakarta: PT Nusa Indah
- Nurudin.2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Riset Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Roelsi, Moeslim. 2005. *Menerobos Mitos Seabad Pers Riau*. Pekanbaru: PWI Cabang Riau.
- Sumadiria, Haris AS. 2005____2007____2008. Cetakan kedua *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sobur, Alex. 2005. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Santana K, Setiawan. 2005. *Jurnalisme Kontenporer*. Bandung. Yayasan Obor Indonesia.
- Tim Wajah Pers Riau. 2007. *Wajah Pers Riau 2007*.Pekanbaru: Serikat Surat Kabar (SPS) Cabang Riau.

Tom E. Rolnicki, C Daw Tate, dan Sherri A. Taylor. *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)*, 2008. Kencana Prenada Media Group.